

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *EMERGENCY RESPONSE PLAN* (ERP) UNTUK KEJADIAN
KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2024**



OLEH:

**PUTRA RIZKI AULIA
2007110010**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2024**

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI *EMERGENCY RESPONSE PLAN* (ERP) UNTUK KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Aceh



OLEH:

PUTRA RIZKI AULIA
2007110010

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Rizki Aulia
NPM : 2007110010
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI *EMERGENCY RESPONSE PLAN* (ERP)
UNTUK KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM (SPBU) DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

Dengan ini saya menyatakan sebagai sebenarnya dan tanpa adanya paksaan, bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya dan pemikiran saya sendiri. Saya tidak melakukan plagiat atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dengan jujur dan tepat.

Saya menyadari bahwa kejujuran dan integritas akademik adalah prinsip utama dalam penulisan skripsi dan dalam menjalani proses pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (FKM UNMUHA).

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan saya dalam menjalani proses akademik.

Hormat Saya,

Banda Aceh, 31 Juli 2024



Putra Rizki Aulia

2007110010

ABSTRAK

Nama : Putra Rizki Aulia

NPM : 2007110010

**ANALISIS IMPLEMENTASI *EMERGENCY RESPONSE PLAN* (ERP) UNTUK KEJADIAN
KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA BANDA
ACEH TAHUN 2024**

xvii + 115 halaman + 9 tabel + 8 lampiran

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan bagian vital dari industri Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) namun berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran. Meskipun ada regulasi seperti Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018, kejadian kebakaran masih sering terjadi di Indonesia. Tahun 2018, tercatat 120 kejadian kebakaran di SPBU di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap SOP, kurangnya keterampilan pekerja, dan kelemahan manajemen keselamatan. Kasus kebakaran di Aceh pada 2017 menunjukkan pentingnya perencanaan *Emergency Response Plan* (ERP). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan ERP di SPBU kota Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di empat SPBU di Banda Aceh, menggunakan pendekatan studi kasus melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah empat orang yang dipilih berdasarkan kredibilitas mereka dalam menjelaskan situasi dan realitas terkait penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan tabel matriks dan analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap SPBU memiliki tingkat kesiapan dan pendekatan yang berbeda dalam penanggulangan darurat. SPBU PT. Coco Sudirman menonjol dengan struktur dan kesiapan ERP yang paling baik, termasuk pelatihan rutin, simulasi, serta adanya tim Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) yang aktif. Sementara itu, SPBU lainnya memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam dokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelatihan yang lebih terstruktur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di keempat SPBU memiliki kelengkapan yang baik dan memenuhi standar operasional prosedur. Penting untuk dicatat bahwa keempat SPBU yang diteliti masih aman dan belum pernah mengalami kebakaran.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada SPBU yang sudah memiliki ERP yang baik, masih banyak yang perlu meningkatkan kesiapan dan respons mereka terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, disarankan agar SPBU yang belum memiliki SOP tertulis segera menyusunnya dan melaksanakan pelatihan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesiapan mereka dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat secara lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Dengan implementasi ERP yang lebih baik, SPBU dapat memastikan keselamatan dan keamanan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : *Emergency Response Plan* (ERP), Kebakaran, SPBU

Daftar Kepustakaan : 25 Bacaan (1980 - 2023)

ABSTRACT

Name : Putra Rizki Aulia

NPM : 2007110010

ANALYSIS OF EMERGENCY RESPONSE PLAN (ERP) IMPLEMENTATION FOR FIRE INCIDENTS AT PUBLIC FUELING STATIONS (SPBU) IN BANDA ACEH CITY IN 2024

xvii + 108 pages + 8 tables + 8 attachments

Public Fueling Stations (SPBU) are a vital part of the Oil and Gas (MIGAS) industry but are at high risk of experiencing work accidents such as fires. Although there are regulations such as the Decree of the Director General of Oil and Gas Number: 0289.K / 18 / DJM.T / 2018, fire incidents still often occur in Indonesia. Until 2018, 120 fire incidents were recorded at gas stations in Indonesia caused by non-compliance with SOPs, lack of worker skills, and weaknesses in safety management. The fire case in Aceh in 2017 showed the importance of Emergency Response Plan (ERP) planning. This study aims to examine the implementation of ERP at gas stations in Aceh.

This study is a qualitative study conducted at four gas stations in Banda Aceh, using a case study approach through interview, observation, and documentation methods. The research informants numbered four people who were selected based on their credibility in explaining the situation and reality related to this study. The data analysis technique used was using a matrix table and content analysis.

The results of the study showed that each gas station had a different level of readiness and approach in emergency response. The PT. Coco Sudirman gas station stands out with the best ERP structure and readiness, including routine training, simulations, and the presence of an active Health, Safety, and Environment (HSE) team. Meanwhile, other gas stations require significant improvements, especially in the documentation of Standard Operating Procedures (SOP) and more structured training. The results of the study also show that the facilities and infrastructure at the four gas stations are well equipped and meet standard operating procedures. It is important to note that the four gas stations studied are still safe and have never experienced a fire.

This study indicates that although there are gas stations that already have good ERP, many still need to improve their readiness and response to emergency situations. Therefore, it is recommended that gas stations that do not yet have written SOPs immediately prepare them and carry out more planned and ongoing training. These steps will improve their readiness to respond and manage emergency situations more effectively and efficiently, and reduce the risk of greater losses. With better ERP implementation, gas stations can ensure higher safety and security for all parties involved.

Keywords: Emergency Response Plan (ERP), Fire, Gas Station

Bibliography: 25 Readings (1980 - 2023)

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tahara Dilla Santi, M. Biomed


Putri Ariscasari, SKM, M. KKK

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Aceh


Dr. Basri Aramico Ib., SKM., MPH
NIDK 19811029 200603 1001
NO : 25 / Um.FKM.M / IX / ND 12024

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI EMERGENCY RESPONSE PLAN (ERP) UNTUK KEJADIAN
KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2024**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Aceh

Oleh:

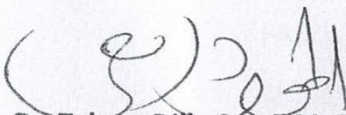
Putra Rizki Aulia
NPM: 2007110010

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Aceh
Telah lulus ujian skripsi pada hari Rabu, 31 Juli 2024

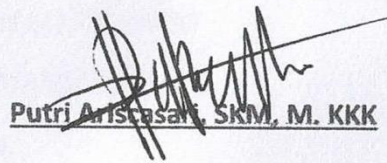
Banda Aceh, 31 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Tahara Dilla Santi, M. Biomed



Putri Aristasari, SKM, M. KKK

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Basri Aramico Ib, SKM, MPH

NIK: 19811029 200602 1001

No: 29/um.FKM.M/IX/10/2024

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh

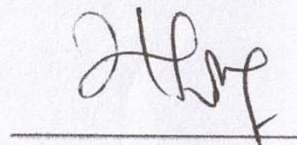
Banda Aceh, 31 Juli 2024

Tanda Tangan

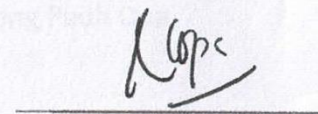
Ketua : Dr. Tahara Dilla Santi, M. Biomed



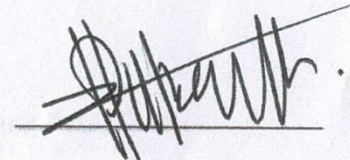
Penguji I : Wardiati, SKM, M.Kes



Penguji II : Nopa Arlianti, SKM, MKM



Penguji III : Putri Ariscasari, SKM, M.KKK



FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

DEKAN,



Dr. Basri Arifin, SKM., MPH

NIM 10011029 200603 1001
No: 27/Um.FKM.M/14/ND/2024

BIODATA

A. Data Pribadi

Nama : Putra Rizki Aulia
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 21 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok, Aceh Timur
E-mail : putrarizkiaulia2106@gmail.com

B. Orang Tua

Ayah : Zainal Abidin Bsc.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok, Aceh Timur
Ibu : Nurseda M. Daud
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Tanjung Kuta, Desa Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok, Aceh Timur

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Kuta Binjei
2. SMP/MTsN : Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Aceh Timur
3. SMA : SMA Negeri 1 Julok
4. PT : Universitas Muhamadiyyah Aceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjarkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat berangkaikan salam tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (FKM-UNMUHA). Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak agar penulis dapat gunakan dalam penelitian selanjutnya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada **Ibu Dr. Tahara Dilla Santi, M.Biomed** selaku pembimbing pertama dan **Ibu Putri Ariscasari, SKM, M.KKK** selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta dukungan mulai dari awal penulisan sampai akhir penulisan ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr. Basri Aramico Ib., SKM., MPH selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Putri Ariscasari, SKM, M. KKK selaku Ketua Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh dan beliau juga selaku Ketua dalam melakukan penelitian payung ini.

4. Para Dosen Penguji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak masukan pada penulis untuk membuat skripsi ini.
5. Kepada seluruh staf Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu dalam proses belajar dan penyusunan persiapan penulisan skripsi.
6. Kepada orang tua penulis tercinta Ayah Zainal Abidin Bsc dan Ibu Nurseda M. Daud yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis di setiap langkah.
7. Kepada Rajwa Waliyyudin, SKM, Tengku Adil Parisi, M. Dea Al-Fattah, dan Rahmat Arya yang telah kebersamai peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2020 mahasiswa FKM-UNMUHA yang telah kebersamai penulis dari awal kuliah sampai di tahap akhir ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan Masyarakat sendiri. Amin

Banda Aceh, 31 Juli 2024

Putra Rizki Aulia
2007110010

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
BIODATA	vii
KATA PENGANTAR	viii
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Umum.....	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Manfaat Teoritis	7
1.5.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Api.....	9
2.1.1 Definisi Api.....	9
2.1.2 Teori Api	10
2.1.2.1 Teori Segitiga Api (<i>Fire Triangle</i>)	10
2.1.2.2 Teori Tetrahedron Api (<i>Fire Tetrahedron</i>).....	12
2.1.2.3 Siklus Api (Life Cycle of Fire).....	13
2.2 Kebakaran.....	15
2.2.1 Definisi Kebakaran.....	15
2.2.2 Tahap-tahap Kebakaran	16
2.2.3 Faktor Penyebab Kebakaran	18
2.3 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	21
2.3.1 Definisi SPBU	21
2.3.2 Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)	22
2.3.3 Tipe-tipe SPBU.....	25
2.3.4 Standar Sarana dan Prasarana SPBU.....	26
2.4 <i>Emergency Response Plan</i>	28
2.5 Emergency Response Plan Pada SPBU	29

2.6	Kerangka Teoritis.....	31
BAB III KERANGKA KONSEP		33
3.1	Konsep Pemikiran.....	33
3.2	Definisi Istilah	34
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....		36
4.1	Jenis Penelitian.....	36
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
4.2.1	Lokasi Penelitian.....	36
4.3	Waktu Penelitian	38
4.4	Jenis Data Penelitian	38
4.1.1	Data Primer	38
4.4.2	Data Sekunder	39
4.5	Informan Penelitian.....	39
4.6	Teknik Pengumpulan Data	40
4.7	Teknik Analisis Data.....	42
4.8	Pengumpulan Data	44
4.9	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	44
BAB V GAMBARAN UMUM		46
5.1	Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	46
5.2	Visi Misi Perusahaan.....	48
5.3	Keamanan Produk & Layanan	48
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
6.1	Hambatan Penelitian.....	50
6.2	Hasil Penelitian	50
6.3	Implementasi <i>Emergency Response Plan (ERP)</i> di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	54
6.4	Pembahasan	75
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		93
7.1	Kesimpulan	93
7.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN		100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Api (Fire Triangle)	11
Gambar 2.2 Teori Tetrahedon Api	12
Gambar 2.3 Gambar Reaksi Pembakaran	13
Gambar 2.4 Siklus Api	15
Gambar 2.5 Tahap-tahap Kebakaran	16
Gambar 2.6 Tangki Timbun	27
Gambar 2.7 Rambu – rambu Larangan Standar PT. Pertamina	27
Gambar 2.8 Kerangka Teoritis.....	32
Gambar 3.1 Konsep Pemikiran.....	34
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	43
Gambar 6. 1 Pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 kg.....	85
Gambar 6. 2 Pengecekan Alat Pemadam Api Berat 80 kg	86
Gambar 6. 3 Instalasi Tetap dan Otomatis.....	87
Gambar 6. 4 Pemeriksaan Berkala Alat Pemadam Api	88
Gambar 6. 5 Nomor Sistem Pelaporan Kebakaran	89
Gambar 6. 6 Tombol Darurat dan Sistem Pemberhentian Kegiatan	90

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 KLASIFIKASI API BERDASARKAN SUMBER BAHAN BAKARNYA (NFPA 10)	20
TABEL 2. 2 KLASIFIKASI KEBAKARAN BERDASARKAN SISTEM EROPA.....	20
TABEL 2. 3 KLASIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO PER.04/MEN/1980 TENTANG SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN	21
TABEL 2. 4 TIPE SPBU PERTAMINA DAN BESARNYA INITIAL FEE	25
TABEL 2. 5 LUASAN DAN KAPASITAS TANGKI TIPE-TIPE SPBU.....	25
TABEL 4. 1 NAMA DAN ALAMAT STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) KOTA BANDA ACEH	37
TABEL 6. 1 KODE INFORMAN	51
TABEL 6. 2 KARAKTERISTIK INFORMAN	52
TABEL 6. 3 SARANA DAN PRASARANA EMERGENCY RESPONSE PLAN	69

DAFTAR SINGKATAN

- APAB : Alat Pemadam Api Berat
- APAR : Alat Pemadam Api Ringan
- ERP : *Emergency Response Plan*
- NFPA : *National Fire Protection Association*
- OSHA : *Occupational Safety and Health Administration*
- PLN : Perusahaan Listrik Negara
- SMKM : Sistem Manajemen Keselamatan Migas
- SOP : Standar Operasional Prosedur

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Informasi Kepada Responden
Lampiran II	Pernyataan Persetujuan Responden
Lampiran III	Lembar Observasi
Lampiran IV	Pedoman Wawancara Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Lampiran V	Surat Izin Penelitian
Lampiran VI	Tabel Analisis Tema
Lampiran VII	Dokumentasi Sarana dan Prasarana
Lampiran VIII	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan ujung tombak mata rantai industri Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) yang berhubungan langsung dengan Masyarakat. dalam menjalankan perannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memiliki kemungkinan besar untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Selama ini, banyak terjadi kecelakaan kerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti kebakaran, tumpahan minyak dan lainnya (Health and Guidebook, 2018).

Menurut Health and Guidebook (2018) buku Keselamatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah memiliki Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018 “Tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi Serta Pengoprasian Instalasi SPBU” telah mengatur tentang sistem tanggap darurat atau *Emergency Response Plan* pada saat terjadinya kecelakaan kerja salah satunya saat terjadi kebakaran. Walaupun sudah ada Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018 “Tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi Serta Pengoprasian Instalasi SPBU” kasus kebakaran atau kecelakaan kerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih sering terjadi di Indonesia. Tercatat selama (tahun 2016 s.d 2018) ada sekitar 120 kejadian yang mengakibatkan kerugian baik untuk Perusahaan maupun kepada konsumen dan Masyarakat.

Data statistic kebakaran di sektor Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) tahun 2019 menunjukkan bahwa kebakaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih mendominasi 61% kejadian, baik itu kejadian kebakaran maupun kecelakaan kerja lainnya, dan Sebagian besar dari kejadian tersebut faktor penunjangnya adalah eksternal, yaitu berasal dari konsumen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jerigen plastik (non metal) (Kementerian ESDM Dirjen Migas, 2020).

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada bahaya kebakaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah ketidak sesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang untuk meminimalisirkan risiko kecelakaan dengan mengatur tindakan dan praktik yang harus diikuti oleh petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, jika Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut diabaikan maka potensi bahaya bisa terjadi kapanpun (Jihan, 2020).

Tidak hanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak dipatuhi dapat menyebabkan kebakaran dari beberapa investigasi yang dilakukan di berbagai kejadian yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti aspek manusia (*lack of skill, culture, competence*), kelemahan rancangan bangunan (*lack of engineering*), seperti desain peralatan, instalasi, tata letak, perpipaan, dan lainnya. Disamping itu, ditemukan juga kelemahan pada pengelolaan keselamatan (*lack of safety management system*) seperti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) (Health and Guidebook, 2018).

Kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyebabkan kerugian terhadap Perusahaan, konsumen, maupun terhadap lingkungan hidup yang disebabkan karena adanya api yang tidak berada pada tempatnya dan dengan kapasitas melebihi hingga tidak dapat terkendali. Tidak hanya merugikan lingkungan hidup, kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga merugikan bagi Perusahaan, pekerja maupun Pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan yang di tunjuk khusus, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan darurat (Syaefudin, Kawatu and Maddusa, 2018).

Di Aceh sendiri, tercatat pada 9 Agustus 2017 terjadi kebakaran pada sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jln Teuku Umar, No 2 Simpang Jam/taman Sari, Banda Aceh dengan No SPBU 14232485 kepemilikan PT Johan Bersaudara, yang mana disebabkan oleh pekerja yang kurang memahami potensi bahaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam *Cable duct* pada saat pembersihan strainer diabaikan. Pekerja tersebut juga kurang terampil dalam mengoperasikan APAR/APAB, dan juga pekerja kritikal seperti pembersih strainer tidak dilengkapi izin kerja sesuai dengan analisis risiko seperti *Job Safety Analysis (JSA)* dan *Emergency Response Plan (ERP)* (Kementerian ESDM Dirjen Migas, 2020).

Faktor yang menyebabkan kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh menjadi esensial mengingat peran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar

kendaraan bermotor dan mobil di Kota Banda Aceh. Disisi lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu sumber potensi risiko serius terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam keselamatan Masyarakat, pekerja serta lingkungan sekitar (Yulianto and Tejamaya, 2022).

Perencanaan *Emergency Response Plan (ERP)* yang baik sangat diperlukan untuk keselamatan dan Kesehatan kerja saat terjadinya kecelakaan kerja terkhususnya kebakaran. *Emergency Response Plan (ERP)* memiliki tujuan apabila saat terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat terdapat tindakan tanggap yang cepat dan tepat agar kerugian yang dialami dapat diminimalisasikan. Tetapi belum seluruh SPBU yang ada di Indonesia terkhususnya aceh memiliki sistem tanggap darurat atau *Emergency Response Plan (ERP)* yang baik. Pelatihan tanggap darurat atau *Emergency Response Plan (ERP)* juga belum dijalankan secara rutin misalnya pada saat terjadinya kebakaran, tumpahan minyak dan lainnya (Health and Guidebook, 2018).

Oleh karena itu, penerapan *Emergency Response Plan (ERP)* harus baik untuk menanggulangi jenis bahaya atau situasi bahaya darurat jenis kebakaran. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1980 mengatur mengenai penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan alat yang dibutuhkan di setiap tempat kerja. Fungsi dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah sebagai alat pertama yang digunakan sebagai pemadam titik api saat titik api tersebut masih kecil atau dalam taraf yang masih dapat dipadamkan dengan alat sederhana seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Busra, Apgani and Lestari, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Kebakaran yang menyebabkan kerugian baik itu segi materi maupun itu nyawa merupakan salah satu kecelakaan kerja yang serius di banyak negara, yang mana Indonesia sendiri termasuk. Aceh sendiri adalah salah satu wilayah di Indonesia yang tercatat pada tahun 2017 terjadi sebuah kasus kebakaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Simpang Jam/Taman Sari Banda Aceh yang diakibatkan oleh pekerja yang kurang memahami potensi bahaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam *Cable Duct* pada saat pembersihan strainer diabaikan. Pekerja tersebut juga kurang terampil dalam mengoperasikan APAR/APAB. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja terkhususnya kebakaran pada SPBU maka peneliti ingin melihat *Emergency Response Plan (ERP)* yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut apakah sudah diterapkan dengan baik dan benar atau belum. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji *Emergency Response Plan (ERP)* ini terkhususnya di Perusahaan yang ada di Aceh. Oleh karena itu, peneliti akan mengeksplorasi tentang sistem *Emergency Response Plan (ERP)* pada kebakaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan melihat penerapan *Emergency Response Plan (ERP)* pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat terjadi bencana kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh, mulai struktur *Emergency Response Plan (ERP)* itu sendiri, isi dari *Emergency Response Plan (ERP)* yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Langkah-langkah

tanggap darurat yang apa saja yang di lakukan saat terjadi kebakaran apakah sesuai dengan yang di jelas dalam *Emergency Response Plan (ERP)* tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melihat Implementasi *Emergency Response Plan (ERP)* pada saat terjadi kebakaran di Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kota Banda Aceh, sehingga saat terjadi kebakaran para petugas sudah mengetahui upaya kesiapsiagaan apa yang di lakukan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis penerapan sistem *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis organisasi *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis penanggulangan tanggap darurat *Emergency Response Pland (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.
4. Untuk menganalisis pelatihan tanggap darurat *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.
5. Untuk menganalisis pelaporan keadaan darurat yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.

6. Untuk menganalisis sarana dan prasarana *Emergency Response Plan* (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui secara mendalam tentang Implementasi *Emergency Response Plan* (ERP) pada saat terjadi kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk mengidentifikasi resiko dan mengantisipasi potensi insiden kebakaran pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga membantu dalam Upaya pencegahan kecelakaan kerja agar kerugian akibat kebakaran dapat ditekan sekecil mungkin dan mencegah agar kejadian kebakaran yang pernah terjadi tidak terjadi lagi.

2. Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang membutuhkan informasi tentang Rencana Tanggap Darurat (*Emergency Response Plan*). Dan menambah bahan pertimbangan dan menambah referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai *Emergency Response Plan* (ERP).

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada *Emergency*

Response Plan (ERP) di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Api

2.1.1 Definisi Api

Api atau proses penyalaaan adalah suatu hal yang kompleks. Untuk terjadinya kebakaran api harus bereaksi kimia bersama bahan bakar, oksigen dan panas saat bersama-sama berada dalam suatu hubungan simbiosis. Dalam proses penyalaaan api, energi panas terlepas melalui suatu reaksi katalis sendiri, menyangkut kondisi suatu bahan bakar pada tahap kondensasi, pada tahap gas, atau kedua-duanya (Ruliyanta and Setyadi, 2022).

Definisi api adalah suatu reaksi kimiawi antara bahan bakar, oksigen, dan terbentuknya panas yang menyebabkan terjadinya ignisi. Api adalah hasil dari suatu reaksi kimia yang terjadi antara bahan bakar, oksigen, dan panas yang dihasilkan dari proses tersebut. Proses ini dikenal sebagai reaksi oksidasi-reduksi, yang pada dasarnya melibatkan transfer elektron antara bahan-bahan yang terlibat. Bahan bakar bertindak sebagai reduktor, atau zat yang kehilangan elektron, sementara oksigen bertindak sebagai oksidator, atau zat yang menerima elektron (Lestari, 2021).

Dalam reaksi ini, bahan bakar bereaksi dengan oksigen dalam atmosfer atau lingkungan sekitarnya. Reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya, yang dikenal sebagai pembakaran atau ignisi. Energi ini dilepaskan karena ikatan kimia dalam bahan bakar diubah menjadi ikatan yang lebih stabil dalam produk-produk hasil reaksi (Syaefudin, Kawatu and Maddusa, 2018).

Proses ini bersifat eksotermik, yang berarti bahwa energi dilepaskan ke lingkungan sekitarnya dalam bentuk panas. Ini membuat api menjadi sumber energi yang penting dalam berbagai kegiatan manusia, seperti memasak, pemanasan, dan transportasi. Selain panas, api juga bisa menghasilkan cahaya dan gas. Cahaya yang dihasilkan berasal dari emisi energi yang terjadi selama proses pembakaran, sedangkan gas yang dihasilkan bisa berupa gas buang seperti karbon dioksida dan uap air (Mursyadi, 2016).

Secara keseluruhan, api adalah manifestasi dari reaksi kimia yang kompleks antara bahan bakar dan oksigen, yang menghasilkan panas, cahaya, dan gas. Proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan berbagai aspek teknologi modern (Affuwani, Amiruddin and Yoga, 2021).

2.1.2 Teori Api

Menurut Riadi (2018), ada tiga teori api yang menjelaskan bagaimana terjadinya api, antara lain yaitu:

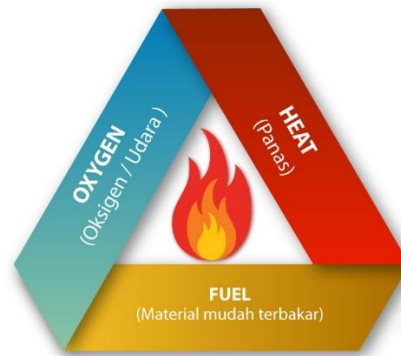
- a. Teori Segitiga Api (*Fire Triangle*).
- b. Teori Tetrahedron Api (*Fire Tetrahedron*).
- c. Siklus Api (*Life Cycle of Fire*).

2.1.2.1 Teori Segitiga Api (*Fire Triangle*)

Teori *fire triangle* ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya api maka harus ada tiga komponen dasar untuk api tersebut terjadi, yaitu:

- a. Bahan bakar (*fuel*).
- b. Oksigen atau oksidator.

c. Sumber panas atau iginisi (*heat*).

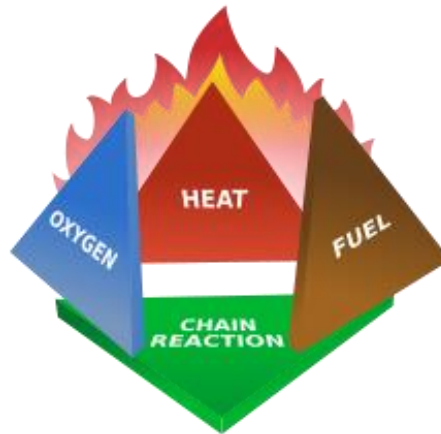


Gambar 2.1 Segitiga Api (*Fire Triangle*)

Ketiga komponen tersebut diibaratkan seperti tiga sisi dari sebuah segitiga. Jika setiap sisinya tidak menyentuh satu dengan yang lainnya, tidak akan terbentuk segitiga, dan api tidak dapat terbentuk jika salah satu komponen api tidak terhubung seperti segitiga tersebut. Menghilangkan salah satu komponen dari komponen segitiga api tersebut merupakan prinsip atau proses pencegahan kebakaran dan pemadaman api. Pencegahan dan pemadaman api dapat dilakukan dengan menghilangkan bahan bakar, tetapi jika tidak memungkinkan pencegahan dan pemadaman api dapat dilakukan dengan menghilangkan sumber panas dengan menggunakan air. Cara lain untuk mencegah dan memadamkan api dengan menghalangi atau menghentikan suplai oksigen dengan cara memberikan foam atau penambahan gas *inert* (Lestari, 2021).

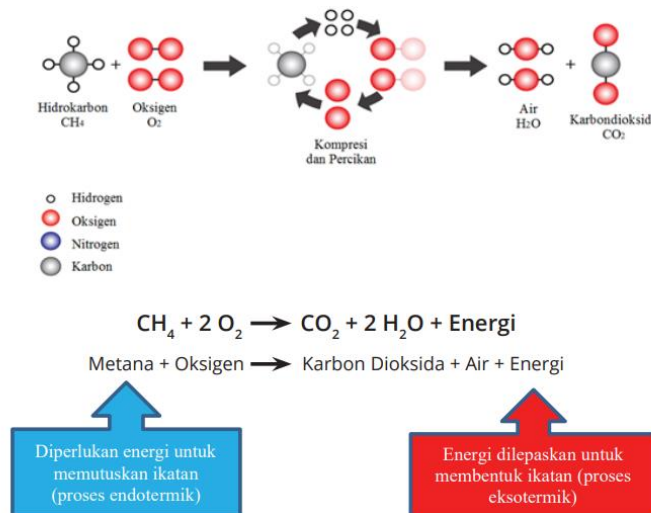
2.1.2.2 Teori Tetrahedron Api (*Fire Tetrahedron*)

Teori ini merupakan pembaharuan dari teori segitiga api dengan adanya satu komponen tambahan yang menunjang terjadinya api, yaitu reaksi kimia berantai.



Gambar 2.2 Teori Tetrahedon Api

Pada teori ini menyatakan bahwa ketika energi yang diberikan pada bahan bakar seperti hidrokarbon, beberapa ikatan karbon dengan karbon lainnya terputus dan menghasilkan radikal bebas. Rantai oksigen dengan oksigen juga terputus menghasilkan radikal oksida. Penggabungan radikal bebas dengan radikal bebas lainnya atau dengan gugus fungsi terjadi jika jarak antar radikal bebas cukup dekat. Kebakaran terjadi secara berantai dengan melepaskan lebih banyak energi lain yang kemudian disebut sebagai reaksi berantai. Proses tersebut baru akan berhenti saat bahan bakar telah habis terbakar, oksigen telah habis dan energi telah diserap atau reaksi rantai terputus. Reaksi kimiawi gas metana sebagai contoh proses terjadinya api di sajikan pada Gambar 2.3 berikut (Lestari, 2021).



Gambar 2.3 Gambar Reaksi Pembakaran

2.1.2.3 Siklus Api (Life Cycle of Fire)

Berbeda dengan dua teori diatas Lestari (2021) menyatakan dalam teorinya, bahwa proses pembakaran terjadi dalam enam tahap yaitu.

a. Masukan/input (*heat*)

Input heat yaitu sejumlah panas yang dibutuhkan untuk melepaskan uap dari padat atau cairan, serta sebagai sumber penyalaan (*ignition source*). Panas yang masuk harus cukup untuk memproduksi uap yang dibutuhkan dalam menyusun campuran yang dapat menyala (*ignitable mixture*) dengan udara dekat sumber bahan bakar secara terus-menerus.

b. Bahan bakar (*fuel*)

Pada dasarnya sama dengan konsep bahan bakar pada *fire triangle* atau *tetrahedron of fire*. Bahan bakar harus pada susunan yang sesuai untuk terbakar.

c. Oksigen

Teori ini hanya membahas oksigen yang ada di atmosfer dan mengabaikan oksigen dan halogen yang dihasilkan dari oksidator. Hal ini dikarenakan pusat dari teori ini adalah penyebaran api (*diffusion flame*) dimana api dihasilkan dari campuran spontan dari uap atau gas bahan bakar dengan udara.

d. Persentuhan (*proportioning*)

Peristiwa benturan antara oksigen dengan molekul bahan bakar. Kecepatan molekul dan jumlah benturan bergantung pada panas dari campuran oksigen dan bahan bakar. Jika campuran lebih panas, kecepatan lebih tinggi.

e. Percampuran (*mixing*)

Pencampuran atau *mixing* yang sesuai setelah panas diterapkan pada bahan bakar sehingga menghasilkan uap yang dibutuhkan untuk pembakaran. Pada *mixing* ini rasio bahan bakar terhadap oksigen harus benar sebelum penyalan tersebut terjadi.

f. Keberlanjutan Penyalaan (*ignition continuity*)

Pada saat kebakaran energi kimia diubah menjadi panas, panas yang dipancarkan dari api Kembali ke permukaan bahan bakar. Panas tersebut harus cukup untuk menjadi panas yang masuk (*input heat*) demi berlanjutnya siklus kebakaran. Maka karena itu, dapat dikatakan bahwa bagian terakhir, *ignition continuity* merupakan langkah pertama untuk siklus kebakaran selanjutnya yaitu masuknya panas (*input heat*).



Gambar 2.4 Siklus Api

2.2 Kebakaran

2.2.1 Definisi Kebakaran

Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil maupun besar di tempat yang tidak diinginkan, merugikan dan pada umumnya susah dikendalikan. Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional mengatakan bahwa kebakaran adalah suatu peristiwa atau bencana yang berasal dari api dengan skala besar yang tidak terkendali, tidak dikehendaki atau di luar kemampuan dan keinginan manusia yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun kerugian non-material. *National Fire Protection Association* mengatakan bahwa kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dimana dalam satu waktu bertemunya tiga unsur yakni, bahan yang mudah terbakar, oksigen yang terdapat di udara, dan panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan kematian manusia (Gorendra gori, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 mengatakan bahwa kebakaran merupakan sebuah fenomena yang berasal akibat adanya peningkatan suhu dari suatu bahan yang kemudian bereaksi secara kimia dengan oksigen sehingga menghasilkan panas dan percikan api, mulai dari awal terjadinya api, proses api itu menjalar, hingga asap dan gas yang ditimbulkan (Mursyadi, 2016).

2.2.2 Tahap-tahap Kebakaran

Menurut Riadi (2018) proses terjadinya kebakaran terbagi menjadi lima tahap yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.5 Tahap-tahap Kebakaran

a. Tahap Penyalaan

Tahap ini ditandai dengan munculnya api. Proses timbulnya api disebabkan oleh adanya energi panas yang terkena material yang dapat terbakar.

b. Tahap Pertumbuhan (*Growth Period*)

Setelah terjadinya tahap penyalaan, pada tahap pertumbuhan ini api mulai berkembang dari bahan bakar. Udara yang ada cukup untuk menyuplai pembakaran.

Jika material terbakar cukup banyak maka pertumbuhan api berlangsung terus, sehingga menyebabkan temperature naik. Pada keadaan ini api dikendalikan oleh bahan bakar. Pada saat ini api masih teralokasi dan temperature masih relatif rendah. Pada tahap pertumbuhan ini merupakan tahap yang paling baik untuk evakuasi penghuni dan sensor sensor pencegahan kebakaran harus sudah bekerja. Upaya pengendalian kebakaran baik dilakukan pada tahap ini, karena selepas *flashover* api susah untuk dikendalikan.

c. Tahap *Flashover*

Flashover secara umum diartikan sebagai masa transisi antara tahap pertumbuhan dengan tahap pembakaran penuh. Proses ini berlangsung sangat cepat, berkisaran 300-600 derajat celcius. Munculnya *flashover* disebabkan oleh adanya ketidak stabilan panas.

Beberapa kriteria kapan terjadinya *flashover* yaitu:

- a. Saat lidah api (*flame*) menyentuh langit-langit.
- b. Saat lidah api (*flame*) mulai menjulur keluar bukaan.
- c. Saat temperature lapis atau 300-600 derajat celcius.
- d. Saat timbul tingkat radiasi kritis.

Ketika *flashover* tercapai, yang sebelumnya terbakar sebagian mendadak dan serentak terbakar seluruhnya. Jadi, *flashover* adalah kondisi dimulainya kebakaran total dalam ruangan. Kecepatan pembakaran naik secara cepat sehingga api susah dikendalikan.

d. Tahap Pembakaran Penuh (*Fully Developed Fire*)

Pada tahap ini kalor yang dilepaskan (*heat release*) adalah yang paling besar, karena kebakaran terjadi keseluruhan. Seluruh material dalam terbakar, sehingga temperature dalam menjadi sangat tinggi mencapai 1200 derajat celcius. Pada tahap ini perkembangan api sanga dipengaruhi oleh dimensi dan udara, karena udara yang menyuplai kebakaran sepenuhnya.

e. Tahap Surut (*Decay*)

Tahap surut tercapai apabila material terbakar sudah habis dan temperature berangsur turun. Selain penurunan temperature, ciri lain tahap ini adalah turunnya laju pembakaran. Pada tahap ini pembakaran api kembali sebagai fungsi dari material yang terbakar. Semakin menyusut bahan-bahan yang dapat terbakar maka api semakin surut.

2.2.3 Faktor Penyebab Kebakaran

Kebakaran dapat disebabkan oleh faktor manusia dan faktor teknis. Kebakaran diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu *Human error/unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* terjadi karena kelalaian dari manusia dan kurangnya profesional dalam bekerja. Sedangkan *unsafe condition* lebih mengarah kepada objek atau lingkungan dari pekerjaan manusia yang memang tidak aman ataupun alat yang dipakai tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) (BPBD, 2021).

Contoh faktor *unsafe action* adalah keterbatasannya keterangan dan pengetahuan manusia/pekerja tentang kebakaran, instalasi listrik yang tidak standar, kompor yang lupa dimatikan saat berpergian, membuang puntung rokok sembarangan, kesengajaan pembakaran hutan untuk membuka lahan, membakar

sampah sembarangan, lain-lainnya. Sedangkan contoh faktor *unsafe condition* adalah kebakaran hutan akibat gesekan antar batang, sambaran petir, gunung api meletus dan lain-lainnya (BPBD, 2021).

Kebakaran juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, seperti cuaca dan bangunan atau bahaya yang ada disekitarnya, sehingga sulit untuk dikendalikan atau dicegah. Tidak hanya itu kebakaran juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti desain bangunan, praktik perbaikan, dan perilaku manusia. Kegagalan dalam pengerjaan tersebut yang mempengaruhi terjadinya kebakaran tersebut (Rathnayake, 2020)

2.2.4 Klasifikasi Kebakaran

Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan kebakaran berdasarkan jenis atau sumber bahan bakarnya. Pengklasifikasi kebakaran ini bertujuan untuk memudahkan usaha pencegahan dan pemadaman saat terjadinya kebakaran. Klasifikasi kebakaran pada beberapa negara berbeda-beda sebagaimana berikut (Lestari, 2021).

- a. Amerika : NFPA 10 *Standard for Portable Fire Extinguishers*
- b. Inggris : *British Standard EN:2 1992: Classification of fires*
- c. Indonesia : Berdasarkan Permenkes No. 04/Men/1980

Amerika mengklasifikasi kebakaran berdasarkan NFPA 10 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

TABEL 2. 1 KLASIFIKASI API BERDASARKAN SUMBER BAHAN BAKARNYA (NFPA 10)

Klasifikasi	Gambar	Deskripsi	Contoh
A		Kelas A: Bahan yang jika terbakar meninggalkan ABU (<i>ASH</i>)	Kayu, tekstil, kertas, serta senyawa organik
B		Kelas B: Cairan mudah terbakar atau cairan yang dapat mengalami pendidihan (<i>BOIL</i>)	Gas mudah terbakar, bensin, alkohol, minyak tanah
C		Kelas C: Listrik (<i>CURRENT</i>)	Kebakaran yang melibatkan peralatan listrik; kecuali jika peralatan listrik tersebut sudah dihilangkan listriknya, kebakaran dapat menjadi Kelas A atau B

Klasifikasi	Gambar	Deskripsi	Contoh
D		Kelas D: Kebakaran dari logam	Natrium, magnesium, titanium, litium, dan kalium
K		Kelas K: Kebakaran dari minyak goreng untuk memasak (<i>cooking oil</i>)	Minyak goreng

Inggris mengklasifikasikan kebakaran berdasarkan BS 2: 1992 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 berikut.

TABEL 2. 2 KLASIFIKASI KEBAKARAN BERDASARKAN SISTEM EROPA

Kelas	Bahan yang Terlibat
A	Padat (bukan logam)
B	Cairan
C	Gas
D	Logam

Indonesia mengklasifikasi kebakaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan yang diadopsi dari NFPA 10, yaitu:

- a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A).
- b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B).
- c. Kebakaran instalasi Listrik bertegangan (Golongan C).
- d. Kebakaran logam (Golongan D).

TABEL 2. 3 KLASIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO PER.04/MEN/1980 TENTANG SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN

Klasifikasi	Deskripsi	Contoh
A	Kelas A: Bahan padat, kecuali logam, jika terbakar meninggalkan ABU (ASH)	Kayu, tekstil, kertas, dan senyawa organik
B	Kelas B: Cairan atau gas mudah terbakar atau cairan yang dapat mengalami pendidihan (<i>BOIL</i>)	Gas mudah terbakar, bensin, alkohol, minyak tanah
C	Kelas C: Listrik bertegangan (<i>CURRENT</i>)	Kebakaran yang melibatkan peralatan listrik; kecuali jika peralatan listrik tsb. sudah dihilangkan listriknya, kebakaran dapat menjadi Kelas A atau B
D	Kelas D: kebakaran dari logam	Natrium, magnesium, titanium, litium, dan kalium

2.3 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

2.3.1 Definisi SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) merupakan bangunan atau tempat penjualan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. SPBU menyediakan berbagai jenis bahan bakar seperti bensin (pertalite, pertamax, dan pertamax turbo), solar

(miyak solar, pertamina dex, dan dextrite) dan jenis bahan bakar lainnya sesuai dengan kebutuhan kendaraan. SPBU dikelola oleh perusahaan atau perorangan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) terletak dilokasi strategis di sepanjang jalan utama, SPBU tidak hanya tempat pengisian bahan bakar, tetapi SPBU juga menyediakan perawatan ringan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat itu sendiri (Affuwani, Amiruddin and Yoga, 2021).

SPBU sendiri menjadi ujung tombak pemasaran BBM untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Karena SPBU sendiri ujung pemasaran BBM secara langsung bersentuhan dengan pelanggan akhir (*end customer*), maka dipandang perlu untuk melakukan pembenahan dan perhatian khusus yang lebih besar (Lestari, Indrayani and Akbar, 2019).

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan prasaran umum disediakan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU disediakan bagi masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Diindonesia terdapa beberapa distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis) (Yakub and Phuspa, 2019).

2.3.2 Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi. Bensin adalah jenis BBM untuk mesin kendaraan dengan sistem pembakaran di dalam (*internal combustion engine*) yang dicirikan dengan besaran *octane number* yang memiliki standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Health and Guidebook, 2018).

Jenis bahan bakar terbagi menjadi dua jika dilihat dari mesin yang digunakan. Secara umum jenis bahan bakar yang tersedia adalah bahan bakar minyak bermesin bensin dan bahan bakar minyak bermesin diesel (My Pertamina, 2021).

1. Bahan Bakar Minyak Bermesin Bensin

Untuk bahan bakar minyak berjenis mesin bensin terdapat tiga jenis bahan bakar yang tersedia yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo.

a. Pertalite

Pertalite adalah jenis bensin dengan angka oktan 90 yang tepat digunakan untuk kendaraan yang memiliki kompresi 9:1 hingga 10:1. Sebenarnya untuk jenis ini lebih cocok digunakan untuk kendaraan keluaran lama. Namun karena angka oktan 90, pertalite masih cocok untuk kendaraan yang banyak beredar di Indonesia saat ini.

b. Pertamax

Pertamax memiliki angka oktan 92 dan sudah standar internasional. Pertamax direkomendasi untuk kendaraan yang memiliki kompresi 10.1 sampai 11.1. untuk bensin berjenis pertamax ini sudah termasuk ke jenis bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga gas emisi dan karbon lebih sedikit. Pertamax sendiri dapat membersihkan bagian dalam mesin serta dilengkapi juga dengan anti karat, dapat melindungi mesin sehingga lebih awet karena pembakaran dimesin menjadi lebih efisien.

c. Pertamax Turbo

Pertamax turbo merupakan jenis BBM pertamina yang dikembangkan oleh pertamina dan Lamborghini. Untuk pertamax turbo ini memiliki oktan 98, lebih tinggi dibandingkan pertamax. Untuk jenis pertamax turbo ini direkomendasi pada

kendaraan yang berkompresi 11.1 hingga 13.1. Bensin berjenis ini meningkatkan akselerasi dan kecepatan kendaraan serta mampu menyempurnakan pembakaran pada jenis mesin. Untuk pertamax turbo lebih cocok digunakan untuk kendaraan tipe sport, baik kendaraan mobil maupun motor.

2. Bahan Bakar Minyak Bermesin Diesel

Untuk bahan bakar mesin yang menggunakan minyak diesel terdapat tiga jenis bahan bakar yang tersedia yaitu Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar.

a. Dexlite

Berbeda dengan pertamax, atau pertalite, untuk kualitas bensin berjenis solar diukur berdasarkan nilai cetane. Dexlite memiliki angka 51 serta mengandung sulfur paling maksimal 1200 ppm. Jenis bensin ini disarankan untuk kendaraan bermesin diesel.

b. Pertamina Dex

Pertamina dex memiliki angka cetane 53 mengandung sulfur kurang dari 300 ppm serta sudah memenuhi standar Euro 3. Direkomendasikan untuk kendaraan bermesin diesel modern. Jenis ini cocok untuk kendaraan umum atau pribadi.

c. Solar

Solar memiliki angka cetane 48 sesuai untuk kendaraan diesel berteknologi lama dengan kandungan sulfur 2500 ppm. Umumnya kendaraan ini dipakai untuk angkutan umum seperti bus dalam dan luar kota, sedangkan untuk kendaraan pribadi bahan bakar diesel dapat menggunakan produk Dexlite atau Pertamina Dex.

2.3.3 Tipe-tipe SPBU

Untuk menentukan tipe-tipe SPBU telah dikelompokkan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi volume penjualan (*throughput*, *luas lahan*, *jumlah dispenser*) hal ini berkaitan dengan jumlah fee yang harus dibayar kepada pihak Pertamina (Yusuf and Koto, 2020).

TABEL 2. 4 TIPE SPBU PERTAMINA DAN BESARNYA INITIAL FEE

TYPE SPBU	PERKIRAAN VOLUME PENJUALAN	BESARNYA INITIAL FEE
SPBU TYPE A	> 35 Kilo Liter	Rp. 800.000.000,00
SPBU TYPE B	> 25 Kilo Liter dan <= 35 Kilo Liter	Rp. 650.000.000,00
SPBU TYPE C	> 20 Kilo Liter dan <= 25 Kilo Liter	Rp. 500.000.000,00
SPBU TYPE D	> 15 Kilo Liter dan <= 20 Kilo Liter	Rp. 350.000.000,00
SPBU TYPE E	<= 15 Kilo Liter	Rp. 250.000.000,00

Selain besarnya initial fee yang harus dibayarkan kepada pihak PT Pertamina, tipe SPBU juga berdasarkan dari luas lahan yang dimiliki untuk unit bisnis yang dijalankan, luas lahan nanti berkaitan dengan lebar muka jalan, kapasitas tangka, panjang selang dispenser dan lain-lainnya.

TABEL 2. 5 LUASAN DAN KAPASITAS TANGKI TIPE-TIPE SPBU

KOMPONEN	TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D	TIPE E
Minimal Ukuran Lahan (m ²)	2500	1600	1225	900	700
Min Lebar Muka Jalan (m)	50	40	35	30	20
Selang (m)	Min. 26	20 – 25	16 – 20	10 - 16	Max 10
Kapasitas Tangki (m)	Min. 160 kl	Min. 140 kl	Min. 100 kl	Min. 80 kl	Min. 60 kl

2.3.4 Standar Sarana dan Prasarana SPBU

Setiap SPBU pasti memiliki standar sarana dan prasarana yang wajib disediakan saat melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut (Aji, 2020).

- a. Tangka Timbun Bawah Tanah;

Peryaratan tangka timbun bawah tanah harus mengikuti standar

1. *Standards Association of Australia (1962): Steel Tanks for the Storage of Flammable and Combustible Liquids.*
2. *British Standards (BS 2594): Carbon Steel Welded Horizontal Cylindrical Storage Tanks.*

- b. Jalur Pemipaan;
- c. Mesin Dispenser;
- d. Instalasi Listrik;
- e. Bangunan SPBU;
- f. Peralatan Proteksi dan Pemadam Kebakaran;
- g. Sarana Lingkungan Hidup;
- h. Sarana Komersial.



Gambar 2.6 Tangki Timbun



Gambar 2.7 Rambu – rambu Larangan Standar PT. Pertamina

2.4 *Emergency Response Plan*

Emergency Response Plan (ERP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdaya guna (Sosa, 2007). Menurut Nick Cartel dalam LIPI UNESCO-ISDR (2006) mengatakan bahwa *emergency response plan* adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk menanggapi suatu situasi bencana secara tepat guna. *Emergency response plan* merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan konsep penanggulangan bencana, mulai pada fase pra-bencana atau pengurangan resiko sebelum bencana terjadi (Busra, Apgani and Lestari, 2023)

Emergency Response Plan (ERP) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna untuk mengantisipasi atau terjadinya berbagai bencana. Mulai dari berbagai pengorganisasian dan melakukan langkah yang tepat. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sendiri sangat pentingnya adanya *Emergency Response Plan* (ERP) karena dengan adanya *Emergency Response Plan* (ERP) tersebut para petugas mengetahui akan melakukan apa saat terjadinya kecelakaan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut (Jihan, 2020)

Emergency Response Plan (ERP) merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh petugas atau penghuni bangunan yang telah ditunjuk sebelumnya, baik dalam penanggulangan maupun dalam upaya penyelamatan penghuni serta aset yang ada. Rangkaian *emergency response plan* ini menyangkut komunikasi, medis, evaluasi dan sebagainya. Dimana tindakan tersebut mencakup tindakan saat berbagai situasi baik saat keadaan darurat yang mudah ditangani hingga keadaan darurat yang sulit

ditangani, serta termasuk pelaksanaan operasi pemadaman tingkat lanjut oleh pasukan dinas kebakaran untuk keadaan darurat kebakaran (suryani, 2021)

Emergency Response Plan (ERP) merupakan suatu sistem untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun material. Oleh karena itu *emergency response plan* sangat penting diterapkan untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang muncul, *emergency response plan* juga merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana (Gorendra gori, 2020).

2.5 Emergency Response Plan Pada SPBU

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi Serta Pengoperasian Instalasi SPBU. Berikut merupakan ketentuan yang harus disiapkan pada setiap SPBU (Health and Guidebook, 2018):

a. Tanda dan Rambu Peringatan SPBU harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan tanda-tanda peringatan sekurangnya sebagai berikut.

- 1) Petunjuk tatacara pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 2) Tanda dilarang merokok atau menyalakan api;
- 3) Tanda harus mematikan mesin kendaraan saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 4) Tanda dilarang menggunakan HP;
- 5) Tanda dilarang menggunakan kamera di area SPBU;
- 6) Rambu peringatan sedang dalam proses pembongkaran BBM;
- 7) Tanda dilarang untuk memasuki area tertentu di SPBU;

- 8) Tanda dilarang berjualan di area operasi SPBU;
 - 9) Tanda dilarang mengisi BBM ke dalam drum/jerigen plastik;
 - 10) Rambu-rambu petunjuk arah lalu lintas di SPBU.
- b. Peralatan Penanggulangan Kebakaran dan Keadaan Darurat
- 1) Sarana penanggulangan kebakaran;
 - 2) Sarana penanggulangan tumpahan dan pencemaran;
 - 3) Deteksi kebocoran;
 - 4) Sarana penanggulangan kecelakaan kerja;
 - 5) Sarana keamanan.
- c. Tanggap Darurat
- 1) Organisasi

Organisasi ini adalah sekelompok orang yang memperhatikan aspek keselamatan seperti yang sudah ditetapkan pada persyaratan OSHA 18001:2007 klausul 4.4.7 *Emergency Preparedness and Response*.
 - 2) Penanggulangan tanggap darurat

Penanganan tanggap darurat adalah orang yang ada di organisasi membantu mengevakuasi orang dan mengevakuasi peralatan dan barang yang berharga.
 - 3) Latihan keadaan darurat

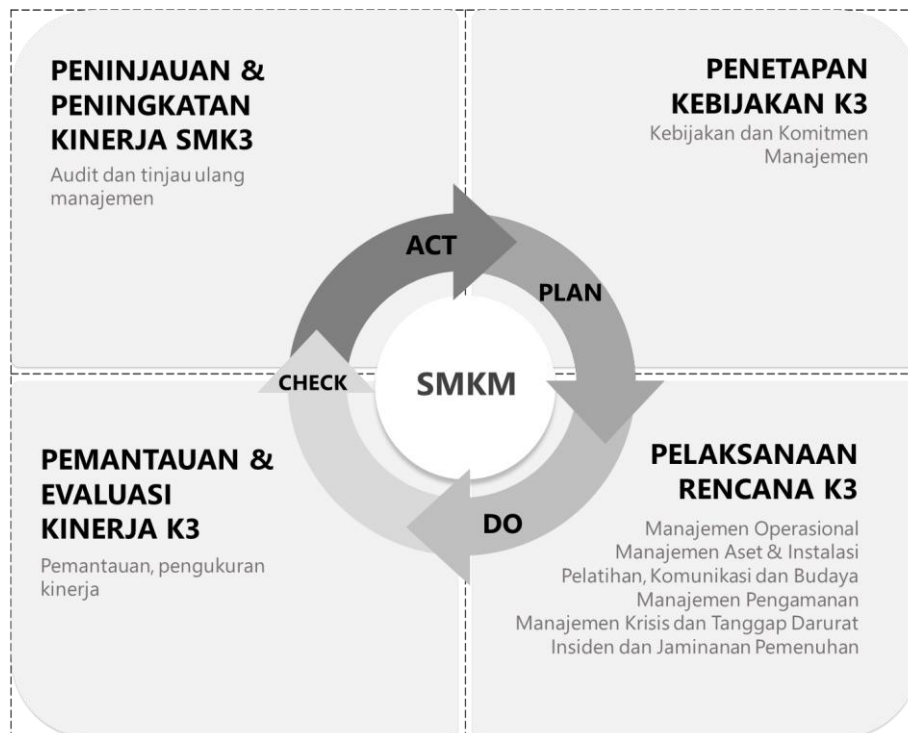
Latihan keadaan darurat adalah latihan wajib bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi *Emergency Response Plan* untuk menyelamatkan/mengevakuasi orang, maupun mengevakuasi barang/peralatan yang berharga.

4) Pelaporan keadaan darurat

Pelaporan keadaan darurat adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak normal dimana keadaan ini terjadi secara tiba-tiba dan harus segera di beritahukan kepada pihak yang menangani keadaan darurat seperti, pemadam kebakaran, PLN setempat, polres, rumah sakit, dan Pertamina.

2.6 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji hipotesis namun membandingkan implementasi atau pelaksanaan sistem dengan standar, adapun standar yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 dan Keputusan Direktur Jendral Minyak Dan Gas Bumi No. 0289.K/18/DJM.T/2018 Tentang Pedoman Teknik Keselamatan Peralatan dan Serta Pengoprasian SPBU. Pendekatan yang digunakan dalam membangun kerangka kerja adalah dengan pendekatan *continual improvement* dan PDCA (*Plan Do Check Act*) berikut kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.8 Kerangka Teoritis

Sumber: (Peraturan Pemerintah RI, 2012; Dirjen Minyak dan Gas Bumi, 2018)

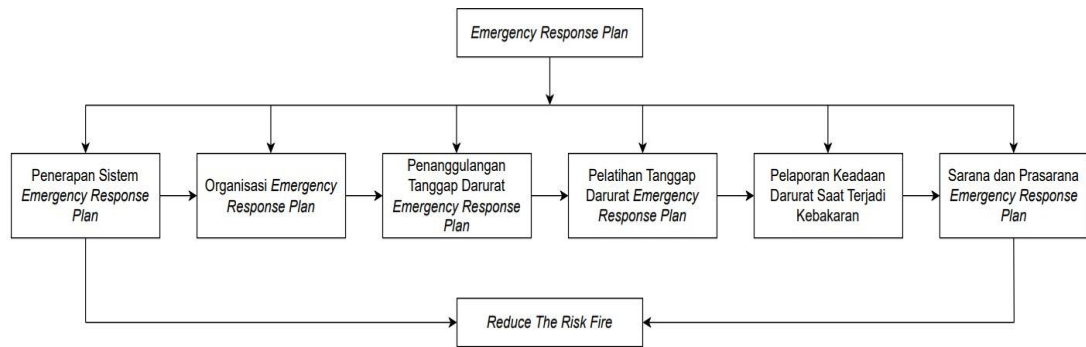
BAB III

KERANGKA KONSEP

3.1 Konsep Pemikiran

Konsep pemikiran pada penelitian merupakan landasan intelektual bagi perancangan, pelaksanaan dan analisis suatu penelitian. Kerangka pikir adalah arahan pikiran yang dibentuk berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan penelitian yang spesifik dan relevan, yang kemudian diperdalam melalui literatur untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang ada. Dalam pengembangan konsep ini kerangka teoritis dibangun dengan merinci konsep-konsep kunci, teori-teori atau model-model yang mendukung pemahaman fenomena yang diteliti.

Emergency Response Plan (ERP) merupakan kegiatan sistem tanggap darurat yang disusun sebelumnya untuk mengatasi dan merespons situasi darurat atau keadaan darurat yang mungkin terjadi. *Emergency Response Plan (ERP)* dirancang untuk membantu organisasi atau entitas dalam menghadapi berbagai macam kejadian darurat contohnya kebakaran. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan Dan Instalasi Serta Pengoperasian Instalasi SPBU. Merujuk teori ini, penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1 Konsep Pemikiran

3.2 Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat disusun definisi istilah sebagai berikut.

1. Penerapan Sistem *Emergency Response Plan* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan sebuah pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Serta Pengoprasian SPBU yang diperuntukan untuk para pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Organisasi *Emergency Response Plan* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan sebuah susunan guna melihat individu yang tergabung kedalam organisasi dengan tujuan meminimalisir atau mitigasi risiko terjadinya kebakaran. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Penanggulangan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan sebuah teknis didalam menanggapi terjadinya sebuah kejadian darurat dan urgent seperti yang

terjadi pada SPBU yaitu kebakaran. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Pelatihan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan sebuah kegiatan yang meliputi serangkaian pendidikan khusus terkait manajemen *Emergency Response Plan* yang tertuju pada karyawan SPBU yang tergabung kedalam kategori organisasi *Emergency Response Plan* yang ada di SPBU. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
5. Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi sistem pelaporan yang dilakukan oleh karyawan SPBU dalam menanggapi kejadian kebakaran di SPBU. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
6. Sarana dan Prasarana *Emergency Response Plan* merupakan serangkaian peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk merespons situasi darurat dengan cepat, efektif dan aman. Adapun metode yang hendak dipakai dalam indikator ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui analisis mendalam terhadap data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara langsung. Penelitian kualitatif sering kali menekankan sudut pandang subjek, menggali proses dan mengungkapkan makna dari fenomena yang diteliti. Metode ini memakai teori-teori sebagai dasar yang mendukung interpretasi dari hasil penelitian agar sesuai dengan realitas lapangan.

Selain teori-teori yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan memberikan landasan untuk pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif mendorong peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif, menganalisis kata per kata, pandangan, dan informasi yang diperoleh dari informan (subjek) dalam konteks situasi alami, dan menyajikannya dalam sebuah laporan penelitian. Sehubungan dengan pendapat diatas maka peneliti ingin melihat secara mendalam tentang Analisis Implementasi *Emergency Response Plan* (ERP) Untuk Kebakaran Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Banda Aceh Tahun 2024.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Berikut adalah

daftar nama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

**TABEL 4. 1 NAMA DAN ALAMAT STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
(SPBU) KOTA BANDA ACEH**

NO	SPBU	ALAMAT
1.	SPBU PERTAMINA LAMNYONG	Jl. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23112, Indonesia
2.	SPBU BATOH	Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23122, Indonesia
3.	SPBU PERTAMINA 14.239.411	Jl. Cut Nyak Dien, Lamtemen Bar., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
4.	SPBU SIMPANG JAM	Jl. Teuku Umar No.6, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116, Indonesia
5.	SPBU PERTAMINA LINGKE 14.239.405	Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114, Indonesia
6.	SPBU PERTAMINA 14.231.482	Jl. Dharma, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia
7.	SPBU PERTAMINA LAMBHUK	Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia
8.	SPBU PERTAMINA 14.232.448	Jl. Medan B. Aceh, Gampong Pie, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
9.	SPBU LUENG BATA 14.232.404	Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia
10.	SPBU LAMPASEH 13.231.408	Jl. Rama Setia, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia
11.	SPBU COCO 11.231.401 RUDIN ACEH	Jl. Jenderal Sudirman No.96, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23233, Indonesia
12.	SPBU PERTAMINA PASTI PAS (SPBU 14.2354.65)	Jl. Teuku Nyak Arief, Sabang, Banda Aceh, Lamgugob, Syiah Kuala, Banda Aceh City, Aceh 24415, Indonesia
13.	SPBU KAMPUNG MULIA (PT. TRINANDA JAYA SINERGI)	Jl. Syiah Kuala Dsn Tgk Dibrang, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia

NO	SPBU	ALAMAT
14.	SPBP POLDA ACEH	Lamtemen Bar., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
15.	SPBU NELAYAN 18.231.001	Jl. Indra Budiman, Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia

4.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 9 Juli 2024, waktu penelitian ini dapat berubah sesuai kondisi yang telah ditetapkan oleh peneliti

4.4 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan secara langsung dengan menggunakan lembar pertanyaan (Paduan wawancara), lembar observasi yang disediakan oleh peneliti, dan menganalisis dokumen.

4.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau yang pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun bentuk file lainnya. Data ini didapatkan melalui narasumber atau dalam istilah teknis adalah responden, yang mana responden adalah orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data-data yang kita perlukan. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa hasil dari interaksi langsung subjek penelitian yang dapat berupa percakapan dalam wawancara atau pengamatan langsung terhadap informasi situasi yang diamati. Wawancara

bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari subjek penelitian atau topik yang sedang diteliti. Wawancara juga membantu peneliti dalam mengumpulkan data primer, memahami sudut pandang subjek, menjelaskan informasi yang tidak jelas, mengidentifikasi pola, mengvalidasi data, dan membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Maka dengan demikian, wawancara berperan sangat penting dalam mendapatkan wawasan yang komprehensif dalam proses penelitian.

4.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang mencakup buku, yang relevan dengan topik penelitian, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang masih berisi informasi yang relevan dengan judul penelitian. Informasi ini digunakan sebagai dasar teoritis dan juga sebagai tambahan data untuk mendukung penelitian ini.

4.5 Informan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian kualitatif konsep pengambilan sampel dan populasi tidak diterapkan karena tujuan penelitian ini bukanlah untuk melakukan generalisasi terhadap populasi tetapi penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami masalah penelitian yang dipilih dengan mendalam, dalam konteks penelitian kualitatif, lebih umum dikenal dengan istilah “informan” daripada populasi dan sampel. Informan dalam penelitian kualitatif dipilih dengan tujuan menjelaskan situasi atau realitas yang relevan dengan informan itu sendiri. Pemilihan informan juga harus

mempertimbangkan relevansi dan kedekatan informan dengan fenomena yang diteliti (*appropriateness*). Dalam konteks penelitian kualitatif, yang lebih umum digunakan adalah istilah “informan” daripada populasi dan sample. Informan dari penelitian ini ada 4 pekerja dari setiap SPBU yang ada di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Satu orang Penanggung Jawab di Setiap SPBU Kota Banda Aceh;
2. Satu orang Kepala di setiap SPBU Kota Banda Aceh;
3. Dua orang Pekerja di setiap SPBU Kota Banda Aceh.

4.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang peneliti gunakan untuk menggali dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, peneliti dapat mengarahkan proses pengumpulan informasi sesuai dengan karakteristik atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memastikan bahwa data tersebut berkualitas tinggi serta relevan.

1. Wawancara

Instrument wawancara adalah alat yang vital dalam proses penelitian, hal ini digunakan untuk mengumpulkan data dari narasumber melalui serangkaian tanya jawab. Instrument ini dapat berbentuk dua bentuk utama, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, tergantung metode penelitian apa yang digunakan. Wawancara yang terstruktur melibatkan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan wawancara tidak terstruktur memberikan kebebasan lebih kepada

narasumber. Dalam kedua bentuk tersebut, peneliti memiliki fleksibilitas menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang permasalahan penelitian. Penyusunan pertanyaan wawancara harus relevan dengan tujuan penelitian dan instrumen harus diuji secara cermat sebelum digunakan. Selain itu, etika saat wawancara harus dijunjung tinggi, termasuk dalam hal izin narasumber, kerahasiaan narasumber, kerahasiaan data, dan perlakuan yang hormat kepada narasumber saat melakukan wawancara. Instrumen wawancara menjadi sarana penting dalam menggali wawasan mendalam dan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan. Mencakup arahan terkait dengan jawal, lokasi, strategis, dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan. Oleh karena itu, pedoman observasi sering kali dibuat dalam format daftar periksa (*checklist*) untuk mempermudah proses pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan langsung dilapangan. Ketika berbicara tentang materi, pedoman observasi berisi panduan mengenai garis besar informasi atau aspek-aspek data yang akan diidentifikasi atau dikumpulkan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Metode dokumentasi juga mencari data mengenai hal-hal yang

yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan sebagainya. Instrument dalam pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini adalah penelitian sendiri. Sedangkan alat bantu peneliti dalam metode dokumentasi adalah perekam gambar atau foto.

4.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan mengverifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data maka, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Menganalisis data kualitatif ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Redution*)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memfokuskan, memilih, mengabstraksi dan mengubah data kasar kedalam catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak saat pengumpulan data dimulai dengan mengringkaskan, memberikan kode, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, yang kemudian diverifikasi.

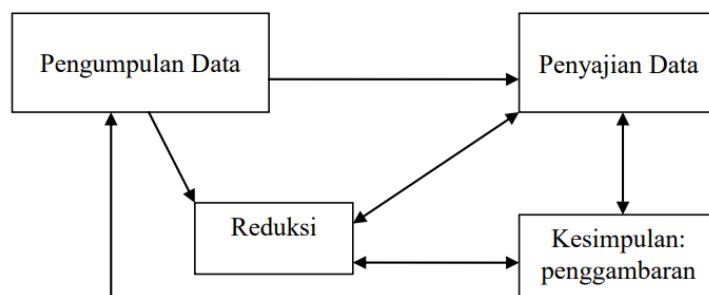
Langkah pertama ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan saat dilapangan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan seluruh data tentang analisis penerapan *emergency response plan* pada SPBU saat terjadi kebakaran.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau data *display* adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya dengan makna sehingga mudah menyimpulkannya. Penyajian data biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Dalam penelitian ini, penyajian data mengenai Analisis Implementasi *Emergency Response Plan* (ERP) Untuk Kebakaran Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Banda Aceh Tahun 2024 disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Berdasarkan hasil analisis data, melalui langkah reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan mengverifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah penelitian. Verifikasi yang dibuat adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, atau sesuai tidaknya kesimpulan tersebut dengan kenyataannya. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan maka sudah di jelaskan di bagan dibawah ini.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data

4.8 Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi dilakukan secara bertahap dan terdiri dari langkah-langkah berikut.

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap persiapan pengumpulan data, proses administratif dimulai dengan memperoleh izin dari Dekan Fakultas Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya, peneliti menyusun lembar, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Peneliti meminta izin kepada kepala SPBU di Kota Banda Aceh terkait;
- b. Peneliti melakukan observasi di area SPBU sesuai dengan lembar observasi yang telah disiapkan;
- c. Peneliti melakukan dokumentasi atas dokumen-dokumen tanggap darurat SPBU di Kota Banda Aceh.

4.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tujuan dari teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini adalah untuk memastikan keakuratan, meminimalkan bias, mengurangi kesalahan dan meningkatkan transparansi. Keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian karena data merupakan landasan utama untuk menganalisis dan munculnya kesimpulan. Data yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi dan kesimpulan yang tidak tepat. Maka dari itu, penelitian yang baik dimulai dengan mengumpulkan data dengan akurat, perawatan data yang

cermat, dan transparansi dalam metode penelitian. Keabsahan data juga melibatkan beberapa pertimbangan baik itu etika dan ketepatan waktu data. Data yang baik adalah dasar untuk mengembangkan pengetahuan yang kuat dalam penelitian (Sa'adah, Rahmayati and Prasetyo, 2022).

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa teknik penting, tetapi pada penelitian ini peneliti memakai teknik uji kredibilitas yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian temuan dan interpretasi data dengan fenomena yang sebenarnya, dengan pengaplikasian metode triangulasi sumber yang mana triangulasi sumber untuk melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. Selain metode triangulasi sumber pada penelitian ini juga memakai metode triangulasi teknik yang mana triangulasi teknik untuk melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dicek dengan wawancara (Sa'adah, Rahmayati and Prasetyo, 2022).

BAB V

GAMBARAN UMUM

5.1 Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki nomor kode SPBU 14.239.411 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berjenis COCO (*Company Operation Company Owner*) dan berstatus “PASTI PAS”. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berlokasi di Jl. Cut Nyak Dien, Lamtemen Barat., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini memiliki pekerja dengan jumlah 18 orang.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki nomor kode SPBU 14.231.482 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berjenis DODO (*Dealer Operation Company Owner*) dan berstatus “PASTI PAS”. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berlokasi di Jl. Dharma, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini memiliki pekerja dengan jumlah 19 orang.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki kode SPBU 11.231.401 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berjenis COCO (*Company Operation Company Owner*) dan berstatus “PASTI PAS”. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.96, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23233, Indonesia. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini memiliki pekerja dengan jumlah 14 orang.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki kode SPBU 14.239.412 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berjenis DODO (*Dealer Operation Company Owner*) dan berstatus “PASTI PAS”. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini berlokasi di Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 Indonesia. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini memiliki pekerja dengan jumlah 12 orang.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini termasuk kategori Pertamina PASTI PAS yang telah bersertifikat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi standar dunia. Konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena “SPBU PASTI PAS!” dengan menggunakan alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas dengan akurat juga merupakan prosedur monitoring yang lebih ketat. Untuk tetap menjamin ketetapan takaran, SPBU selalu melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batasan toleransi akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU selalu melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa dan juga dengan batas toleransi lebih ketat.

Konsumen yang datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan disambut dengan senyum, salam, dan sapa dari operator. Untuk memastikan konsumen mendapatkan volume yang akurat operator akan menunjukan pada anda mesin pompa yang menunjukan angka nol sebelum mulai pengisian. Untuk mendapatkan sertifikasi “PASTI PAS!”, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus telah melakukan audit kepatuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

Audit mencakup standar pelayan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah mendapatkan sertifikat “PASTI PAS!”, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan tetap melakukan audit secara rutin. Jika audit yang dilakukan tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI PAS!.

5.2 Visi Misi Perusahaan

1. Visi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - a. Menjadikan Perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
 - b. Menjadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berkualitas.
2. Misi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - a. Membuka lapangan pekerjaan yang baru.
 - b. Memberikan kemudahan bagi Masyarakat dalam melakukan pengisian Bahan Bakar Umum
 - c. Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan *Pasti Pas!*.

5.3 Keamanan Produk & Layanan

Pada tahun 2019 Pertamina menerapkan layanan baru yaitu “*Call Center 135*”, dan menuntaskan digitalisasi 2.975 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari 5.518 target Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Komitmen layanan terbaik ini di berikan kepada pelanggan dengan memperhatikan Undang-

Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelayanan kepada pelanggan menjadi tanggung jawab Fungsi *Customer Care* yang secara berkala menyampaikan laporan kinerja kepada Direksi. Selain itu, Pertamina juga menjamim keselamatan pelanggan terkait dengan penggunaan produk-produk Pertamina, termasuk produk-produk yang digunakan Masyarakat. Pertamina memastikan seluruh (100%) proses produksi, produk Perseroan serta pengembangannya telah melalui penerapan mutu, keselamatan, Kesehatan, keamanan, dan kelola lingkungan (QHSSE) untuk memastikan pengaruhnya pada keselamatan dan Kesehatan pelanggan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Hambatan Penelitian

Adapun Hambatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam perizinan untuk meneliti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi kendala utama. Dari 15 SPBU yang kami teliti, hanya 4 SPBU yang memberikan izin. Sedangkan, SPBU lainnya mengharuskan adanya izin dari pihak PT. PERTAMINA (Persero) di Banda Aceh. Namun, pihak PT. PERTAMINA (Persero) tidak memberikan respon terhadap permohonan izin yang kami ajukan, bahkan hingga hari pelaksanaan penelitian. Akibatnya, SPBU yang memerlukan izin dari PT. PERTAMINA tidak memberikan izin untuk dilakukan penelitian di lokasi mereka.
- b. Saat melakukan wawancara mendalam dengan informan, beberapa di antaranya menolak untuk diwawancarai dengan alasan waktu kerja yang padat dan waktu istirahat yang singkat.
- c. Manajer yang susah di temui sehingga manajer mewakilkan pengawas lapangan sebagai informan untuk peneliti wawancara.

6.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2024 – 09 Juli 2024. Dengan informan berjumlah 4 orang informan yaitu 1 orang manager, dan 3 orang

pengawas lapangan di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Banda Aceh.

TABEL 6. 1 KODE INFORMAN

No	Kode Informan	SPBU	Jabatan	Lama Wawancara
1.	Informan 1	PT. Sinar Pusaka (SPBU PERTAMINA 14.239.411)	Manager	11:03 Menit
2.	Informan 2	PT. Asny Syaufi Petroleum (SPBU PERTAMINA 14.239.412)	Pengawas Lapangan	18: 51 Menit
3.	Informan 3	PT. Coco Sudirman (SPBU COCO 11.231.401 RUDIN ACEH)	Pengawas Lapangan	38:14 Menit
4.	Informan 4	PT. Lampaseh Jaya Montes (SPBU PERTAMINA 14.231.482)	Pengawas Lapangan	23:32 Menit

Pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait manajemen keselamatan *Emergency Response Plan (ERP)* saat terjadi kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh. maka diperoleh hasil penelitian kualitatif sebagai berikut.

6.2.1 Karakteristik Informan

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana pemilihan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan menyediakan informasi melalui wawancara.

Adapun informan dalam penelitian ini ada sebanyak 4 orang informan. Pemilihan informan telah dipertimbangkan relevansi pengalaman, kepangkatan, kepercayaan, etika, kemampuan berkomunikasi dan pemahaman terhadap konteks tersebut. Adapun karakteristik informan adalah sebagai berikut.

TABEL 6. 2 KARAKTERISTIK INFORMAN

No.	Kode Informan	Umur	Jabatan	Lama Bekerja	Pendidikan
1.	Informan 1	50 Tahun	Manager	20 Tahun	Perguruan Tinggi
2.	Informan 2	26 Tahun	Pengawas Lapangan	5 Tahun	Perguruan Tinggi
3.	Informan 3	34 Tahun	Pengawas Lapangan	3 Tahun	SMA
4.	Informan 4	44 Tahun	Pengawas Lapangan	15 Tahun	SMA

6.2.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan surat izin yang telah diberikan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tanggal 12 Juni 2024. Penelitian ini dilaksanakan di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Banda Aceh. Setiap SPBU memiliki satu informan, sehingga total informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah empat orang yang terdiri dari 1 manager, dan 3 pengawas lapangan SPBU yang mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dimulai pada hari Senin, 24 Juni 2024, dengan penyebaran surat izin penelitian ke empat SPBU di Kota Banda Aceh, yakni SPBU PT Sinar Pusaka, SPBU PT Lampaseh Jaya Montes, SPBU PT Coco Sudirman, dan SPBU PT Asny Syaafi Petroleum. Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dalam rentang waktu yang lebih luas, mulai dari tanggal 1 hingga 9 Juli 2024. Setiap lokasi SPBU menjadi fokus penelitian untuk mengumpulkan data terkait Implementasi *Emergency Response Plan (ERP)* menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif yang meliputi penerapan sistem *ERP*, organisasi *ERP*, penanggulangan tanggap darurat, pelatihan tanggap darurat, pelaporan keadaan darurat saat terjadi kebakaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung *ERP* di SPBU tersebut.

Penelitian lapangan pertama dilakukan pada hari Senin, 1 Juli 2024, di SPBU PT Sinar Pusaka dari pukul 15:00 hingga 16:00 WIB. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan Manager SPBU sebagai sumber utama informasi. Selanjutnya, pada hari Selasa, 2 Juli 2024, penelitian dilanjutkan di SPBU PT Asny Syaafi Petroleum pada jam 09:00-10:00 WIB. Fokus penelitian pada kali ini adalah melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan pengawas lapangan sebagai sumber utama informasi, yang dipilih karena memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai operasional harian dan kualitas layanan di SPBU tersebut.

Penelitian berikutnya dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juli 2024, di SPBU PT Coco Sudirman pada jam 09:30-11:00 WIB. Pada kesempatan ini, penelitian kembali difokuskan pada wawancara mendalam dengan pengawas lapangan SPBU sebagai

sumber utama informasi. Penelitian serupa juga dilakukan pada Kamis, 4 Juli 2024, di SPBU PT Lampaseh Jaya Montes pada jam 16:10-17:00. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi terkait *Emergency Response Plan (ERP)*.

6.3 Implementasi *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Implementasi *Emergency Response Plan (ERP)* adalah suatu rencana tindakan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu keadaan darurat dengan cepat, tepat dan efektif, melalui pendekatan penerapan sistem ERP, organisasi ERP, penanggulangan tanggap darurat ERP, pelatihan tanggap darurat ERP, pelaporan keadaan darurat dan sarana dan prasarana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

6.3.1 Penerapan *Emergency Response Plan*

Penerapan *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi: manajemen *Emergency Response Plan*, SOP *Emergency Response Plan*, pelaksanaan *Emergency Response Plan*. Pada komponen pertama, peneliti menanyakan tentang penerapan manajemen *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Masih kurang juga".*

Informan 2: *"Maksudnya kek mana, ooo kalo misalkan untuk menjaga - jaga ya, untuk menjaga – jaga tu perusahaan menyediakan banyak APAR, abistu punya juga nomor telephon emergency dan lain sebagainya."*

Informan 3: *"Kalao menurut saya, disini tu eee kita punya sistem apa ya emergency respon plan yang cukup bagus ya apalagi ee, di awal saya sudah sebut dikita itu ada Namanya tu eee organisasi tanggap darurat namanya tu dan itu melibatkan seluruh*

pekerja jadi, eee semua anggota semua pekerja kita itu sudah kita bekali ilmu untuk keadaan tanggap darurat itu, jadi kalo menurut saya penerapan emergency response plan itu di SPBU ini sudah kita terapkan dan alhamdulillah sudah sejauh ini berjalan dengan cukup baik.”

Informan 4: *“emm... heueue yaa eee susah saya jelasin ya karna kan ya moga - moga enggak kan karena yaa eee jadi kita memang sudah ada berdasarkan pengalaman mungkin gamblang penjelasannya eee yang tapi ya responnya ya harus cepat lah haaa lebih cepat untuk menanggulangi masalah bila ada emergency eee kecelakaan kerja baik kah itu tumpahan minyak kebakaran mungkin masalah lain lagikan harus cepat lah heueu.”*

Pada komponen kedua, peneliti menanyakan tentang penerapan SOP *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *“Enggak ada, seharusnya ada tempat titik kumpul kalo ada terjadi, nah ini gak ada.”*

Informan 2: *“Kalo yang tertulis kali itu belum, ya tapi secara ini ada gitu, ga ada yang kayak format yang di dokumentasikan tertulis gitu.”*

Informan 3: *“Dalam struktur organisasi, terdapat beberapa peran penting Komandan sebagai pemimpin, Kepala Regu Penunjang yang mendukung dan mencatat riwayat kejadian, Kepala Regu Pemadam yang bertugas memadamkan dan mencegah kebakaran dengan cepat, serta Kepala Regu Penyelamat yang mengevakuasi konsumen dan aset perusahaan. Setiap anggota memiliki tugas khusus yang telah ditentukan untuk memastikan respons yang efektif terhadap situasi darurat.”*

Informan 4: *“Dalam situasi kebakaran, kami bersyukur sampai saat ini belum pernah mengalaminya. Namun, jika terjadi, prosedur operasional standar (SOP) sudah jelas. Penjualan akan segera dihentikan, kemudian kami menghubungi pemadam kebakaran, kepolisian setempat, serta melaporkan kejadian kepada atasan dan PERTAMINA. Tindakan P3K dan tanggap darurat di lapangan langsung dilakukan oleh operator dan pengawas SPBU. Jika api sulit dikendalikan, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran..”*

Pada komponen terakhir penerapan *Emergency Response Plan*, peneliti menanyakan tentang penerapan pelaksanaan *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *“Ya ini, petugas harus siap dengan alat pemadam”*

Informan 2: *“Kalo sewaktu – waktu terjadi ya para apa itu namanya para oprator pasti menggunakan APAR dan sebagainya kayak gitukan, mereka paham kayak tadi mereka telah mengikuti pelatihan dan mereka paham cara penggunaannya”*

Informan 3: *“kalauuu di SPBU ini menurut saya kami sudah menjalankan dengan optimal.”*

Informan 4: *“Eee tindakannya ya yang seperti saya utarakan tadi eee tidak apa namanya memang harus cepat tanggap eee udah itu juga seperti yang saya bilang tadi kita harus komunikasi ke pihak pemadam kebakaran kepolisian dan juga pihak Pertamina langsung ee yang udah pasti apa namanya sigap kesiapan para operatornya di lingkungan kerja heueu.”*

Wawancara mengenai penerapan *Emergency Response Plan* (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengungkap beberapa temuan penting. Dalam

hal manajemen ERP, sebagian narasumber merasa bahwa implementasinya belum maksimal meskipun sudah tersedia fasilitas seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan nomor telepon darurat. Di sisi lain, beberapa narasumber menilai bahwa sistem tanggap darurat sudah memadai dan melibatkan seluruh staf. Terkait dengan Standard Operating Procedure (SOP) ERP, terdapat kekurangan dalam dokumentasi tertulis, seperti belum adanya penentuan titik kumpul yang jelas. Namun, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa sudah ada struktur organisasi yang baik, di mana setiap anggota memiliki tugas spesifik dalam situasi darurat. Dalam penerapan ERP, kesiapsiagaan petugas dan penggunaan APAR dianggap sebagai langkah kunci, dengan penekanan pada pentingnya pelatihan dan respons yang cepat. Secara keseluruhan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti dokumentasi dan penentuan titik kumpul, penerapan ERP di SPBU ini sudah berjalan cukup baik menurut sejumlah narasumber.

6.3.2 Organisasi *Emergency Response Plan*

Organisasi *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi: unit/organisasi khusus, yang termasuk dalam organisasi khusus, dan kinerja tim organisasi khusus tersebut. Pada komponen pertama, peneliti menanyakan tentang unit/organisasi khusus *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Tidak ada"*

Informan 2: *"Unit khusus penanggulanga, Maksudnya? Kalo terjadi misalkan ya para operator langsung yang apa itu namanya terjun langsung ke ini, dikarenakan belum pernah ini kan tapi secara SOP mereka yang akan tanggani langsung gitu"*

Informan 3: *"Ada, kalau organisasi khusus ya semua pekerja kita itu adalah struktur organisasinya."*

Informan 4: *"biasanya kalo mengenai safety HSSE yang saya tau itu dia mengenai safety baik pokoknya safety lah semuanya di SPBU gitu."*

Pada komponen kedua, peneliti menanyakan tentang yang termasuk dalam organisasi khusus *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Tidak ada"*

Informan 2: *"Semuaa, semua karyawan kayak gitu"*

Informan 3: *"Seluruh pekerja SPBU"*

Informan 4: *"kalo struktur gak ada dek, kita semuanya harus peran aktif."*

Pada komponen terakhir organisasi *Emergency Response Plan*, peneliti menanyakan tentang kinerja tim organisasi khusus *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Tidak ada"*

Informan 2: *"Kalo menurut pendapat saya pribadi, mereka tu semuanya akan paham apa yang akan mereka lakukan tindakan - tindakan yang akan mereka lakukan gituloh"*

Informan 3: *"Okee, jadi gini kalo misalkan terjadi kebakaran di SPBU itu kan eee kita belum tau yak arena belum pernah kejadian kita berharap juga jangan sampai kejadian tapi eee kita bisa menilai eee Ketika kita melakukan simulasi OKD tersebut nah Ketika kita melakukan simulasi OKD itu disitu kita melihat dan menilai itu"*

sipekerja yang terlibat memang bener – bener fokus bener – bener punya ilmunya atau tidak gitu menurut saya semua pekerja kit aitu sudah dibekali dengan ilmu yang cukup matang ya yang untuk hal penanganan darurat tersebut.”

Informan 4: *“Baik.”*

Wawancara mengenai penerapan Emergency Response Plan (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengungkap berbagai pandangan terkait keberadaan unit khusus untuk menangani keadaan darurat. Informan 1 menyatakan bahwa tidak ada unit khusus yang dibentuk, sementara Informan 2 dan Informan 3 mengungkapkan bahwa semua pekerja memiliki peran dalam penanggulangan situasi darurat. Di sisi lain, Informan 4 menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja (Health, Safety, Security, and Environment/HSSE) di lingkungan SPBU. Mengenai komposisi organisasi darurat, seluruh informan sepakat bahwa setiap karyawan terlibat dalam penanganan keadaan darurat meski tanpa adanya struktur formal yang jelas. Dalam hal kesiapan tim, Informan 2 dan Informan 3 merasa yakin bahwa para pekerja telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat, meskipun belum pernah mengalami insiden nyata. Keseluruhan wawancara ini mencerminkan adanya kesadaran dan kesiapan yang tinggi dari para pekerja dalam menghadapi potensi bahaya di SPBU.

6.3.3 Penanggulangan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan*

Penanggulangan tanggap darurat *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi: penanggung jawab pembuatan dokumentasi, perencanaan prosedur, dan perencanaan pengendalian risiko. Pada komponen pertama, peneliti menanyakan penanggung jawab pembuatan

dokumentasi *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Pengawas"*

Informan 2: *"Pembuatan dokumentasi kalo terjadi?, kalo terjadi yaa bisa manager bisa pengawas kek gitu"*

Informan 3: *"Pembuatan dokumentasi itu ada tugasnya di regu penunjang nah."*

Informan 4: *"ini lebih kurang pelaporan ya?, secara tertulis ya, kalo pelaporannya udah pasti dari pihak manajemen lah heueu dari pihak manajemen."*

Pada komponen kedua, peneliti menanyakan tentang yang termasuk dalam perencanaan prosedur *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Enggak ada. Gak ada juga karena belum ada bahaya"*

Informan 2: *"Membuat perencanaan prosedur, kalo yang tertulis setau saya belumm, kayaknya ya misalkan yang tertempel di dinding itu belum yaa. Kalo mengidentifikasi bahayakan perusahaan itukan sudah memberikan pelatihan kayak saya bilang diawalkan jadi itu salah satu cara untuk memitigasi apa itu namanya bencana kayak gitoo, untuk mencegah aa terjadinya bencana atau terjadinya apa kayak gitoo kan dengan diberikannya pelatihan kayak gitoo, tapi menggunakan pihak eksternal atau pihak luar untuk melakukannya kayak gitoo"*

Informan 3: *"Prosedur identifikasi potensi bahaya di SPBU sudah disusun oleh tim HSE kantor pusat sebelum operasional dimulai. Dokumen terkait disimpan di kantor pusat, tetapi selalu disampaikan kepada seluruh pekerja melalui briefing, meeting,*

dan simulasi OKD. Tim HSE bertanggung jawab atas penyusunan prosedur penanggulangan kebakaran, pelaporan insiden, serta prosedur keselamatan, termasuk dalam pekerjaan di ketinggian..”

Informan 4: *“kalo itu kek mana saya jelasinnya ya kalo itu, ini contohnya kek mana ini saya kurang paham ini, haa teros heueu nah itu ada, kalo kayak adek bilang itu ada paham saya ada. Kalo untuk proses pembongkaran ada kalo untuk yang khusus dari kantor gak ada heueu.”*

Pada komponen terakhir penanggulangan tanggap darurat *Emergency Response Plan*, peneliti menanyakan tentang perencanaan pengendalian risiko *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *“Belom ada”*

Informan 2: *“Belum ada”*

Informan 3: *“Organisasi tanggap darurat di SPBU dibentuk sebagai bagian dari rencana penanggulangan bahaya. Struktur organisasi disusun oleh manajer yang bertanggung jawab, termasuk penunjukan kepala regu pemadam, regu penunjang, dan regu penyelamat, dengan manajer berperan sebagai komandan regu.”*

Informan 4: *“Implementasi Emergency Response Plan (ERP) di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti buku pedoman. Arahan dan himbauan dilakukan secara rutin melalui briefing harian. Penanganan situasi darurat dilakukan langsung di lapangan dan tidak sepenuhnya terstruktur dalam buku. Meskipun buku menjadi pedoman*

utama, situasi di lapangan seringkali berbeda dan memerlukan penyesuaian yang tidak selalu tercakup dalam dokumen tersebut.”

Berdasarkan wawancara mengenai penerapan Emergency Response Plan (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ditemukan variasi dalam tanggung jawab dan perencanaan ERP. Untuk pembuatan dokumentasi, tanggung jawab melibatkan berbagai pihak mulai dari pengawas hingga manajer, dengan beberapa informan menyebutkan peran regu penunjang atau pelaporan dari manajemen. Dalam perencanaan prosedur, terlihat adanya kekurangan dokumentasi tertulis dan prosedur formal di lapangan, meskipun pelatihan dan briefing rutin dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Struktur organisasi dan prosedur identifikasi bahaya diatur oleh tim HSE pusat, namun dokumen tersebut seringkali tidak tersedia di tingkat SPBU. Untuk perencanaan pengendalian risiko, ada yang mengatakan bahwa struktur organisasi darurat sudah terbentuk dan ditunjuk oleh manajer, sedangkan yang lain mengungkapkan bahwa belum ada rencana pengendalian risiko yang formal. Implementasi ERP di lapangan seringkali memerlukan penyesuaian yang tidak sepenuhnya tercantum dalam pedoman buku, sehingga tergantung pada briefing harian dan respons langsung di lapangan.

6.3.4 Pelatihan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan*

Pelatihan tanggap darurat *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi: program pelatihan, kepada siapa program pelatihan tersebut, dan drilling tanggap darurat. Pada komponen pertama, peneliti menanyakan program pelatihan *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Ada dulu"*

Informan 2: *"Dii pada saat pelatihan eksternal itu yang ada"*

Informan 3: *"Ada ya seperti yang sudah pernah saya mention sudah pernah saya sebutkan tadi yang sudah pernah saya sebutkan OKD simulasi OKD yang kita lakukan setahun dua kali."*

Informan 4: *"Kalo pelatihan dari PERTAMINA ada."*

Pada komponen kedua, peneliti menanyakan kepada siapa program pelatihan *Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"Operator dan pengawas. Minimal 1 tahun 1 kali"*

Informan 2: *"Iya ke operator yang bekerja. Seingat saya setahun itu sekali tapi bergilir jadi operator yang sudah melakukan tidak melakukan lagi"*

Informan 3: *"Seluruh seluruhnya seluruh pekerja jadi semua pekerja disini tuh semuanya terlibat dalam pelatihan tersebut gitu baik itu managernya supervisornya adminnya eee kepala shiftnya security ada CS apalagi operator semua element terlibat kalua di kita itu. Setahun dua kali."*

Informan 4: *"Biasanya ke oprator diberikan. Itu 2 kali dalam satu tahun kalo gak salah."*

Pada komponen terakhir pelatihan tanggap darurat *Emergency Response Plan*, peneliti menanyakan tentang *drilling Emergency Response Plan* pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *"bukan disini, tapi kami dilatihnya di PERTAMINA. Sekitar 1 tahun yang lalu. Pengawas dan operator"*

Informan 2: *"Drilling itu maksudnya gimana?, itu tetap sama di pihak eksternal pihak kantor pemadam itu sudah satu paket soalnya"*

Informan 3: *"Adaa jadi untuk bukti para pekerja itu melakukan drilling tanggap darurat itu kita ada Namanya itu piagam penghargaan dariiii damkar banda aceh ya gitu. Kalua yang untuk pekerja langsung itu dilakukan pada tahun 2021 tapi bagi pekerja - pekerja baru ini mereka diterima kerja disini itu sebelum mereka bekerja disini eee mereka di drilling dulu maksudnya dilakukan eee pelatihan dulu di damkar setelah mereka mendapatkan piagam tersebut baru mereka itu dinyatakan boleh bekerja di SPBU gitu."*

Informan 4: *"Di SPBU kami, pelatihan pemadaman api melibatkan pembakaran tong berisi bahan bakar dan ban mobil bekas menggunakan APAR. Terakhir dilakukan pada Februari tahun ini, dengan frekuensi 3 hingga 4 kali setahun. Pelatihan ini diadakan oleh manajemen SPBU, sedangkan pelatihan dari PERTAMINA melibatkan pemadam kebakaran."*

Dari wawancara mengenai pelatihan tanggap darurat Emergency Response Plan (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), disimpulkan bahwa pelatihan mencakup beberapa komponen penting yang dilaksanakan secara teratur. Program pelatihan ERP mencakup sesi pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh PERTAMINA dan simulasi OKD yang diadakan dua kali setahun. Pelatihan ini melibatkan seluruh karyawan SPBU, termasuk operator, pengawas, manajer, dan staf

lainnya, dengan frekuensi satu hingga dua kali dalam setahun. Drilling tanggap darurat dilakukan baik di luar SPBU, melibatkan pihak eksternal seperti pemadam kebakaran, maupun di lokasi dengan teknik tertentu seperti penggunaan APAR dan pemadaman api. Selain itu, ada pemberian piagam penghargaan dari pemadam kebakaran sebagai tanda partisipasi dalam drilling. Secara keseluruhan, pelatihan dan drilling ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh staf siap menghadapi situasi darurat, dengan mencakup berbagai aspek dari pelatihan dasar hingga lanjutan yang dilakukan secara berkala.

6.3.5 Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran

Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi: proses pelaporan, siapa yang dihubungi pertama, dan seberapa cepat respon. Pada komponen pertama, peneliti menanyakan proses pelaporan keadaan darurat saat terjadi kebakaran pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *“Pelaporan langsung dengan ownernya. Tidak ada, belum ada”*

Informan 2: *“Kalo misalkan ya terjadi kebakaran atau apa kek gitu kami ada nomor khusus yang dihubungi*

Informan 3: *“Dalam situasi kebakaran, tidak ada prosedur tertentu yang kaku, lebih pada langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi kebakaran dengan cepat. Regu pemadam bertindak cepat untuk mencegah penyebaran kebakaran, sementara regu penunjang bertugas melaporkan situasi kepada manajer dan pemadam kebakaran..”*

Informan 4: *“kalo memang pelaporan – pelaporan khusus ada sebenarnya Cuma kayak saya bilang tadi kalo ada apa kecelakaan kerja eee biasanya kita ngelapor apa namanya ke atasan ke instansi terkait terdekat seperti kepolisian, pihak PERTAMINA juga dan juga pihak pemadam kebakaran eee paling ya kayak gitu.”*

Pada komponen kedua, peneliti menanyakan siapa yang dihubungi pertama saat terjadi kebakaran pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut.

Informan 1: *“Pemadam, pemadam dulu”*

Informan 2: *“Kalo misalkan terjadi kebakaran ya langsung ke apa itu namanya ke yang pemadam langsung karena kan misalkan ga ada managernya adanya pengawas pengawas yang langsung hubungi, kalo manager sama operatornya ga ada operator yang langsung hubungi gitoo, karena kan ga mungkin menunggu manageratau pengawas lagi kan langsung aja on poin ke pemadam”*

Informan 3: *“Dalam keadaan darurat kebakaran, orang terdekat bertanggung jawab mengambil tindakan awal. Regu pemadam mengendalikan api, sementara regu penunjang melaporkan situasi kepada manajer dan pemadam kebakaran. Koordinasi dan respons cepat dari semua regu sangat penting untuk penanganan yang efektif..”*

Informan 4: *“Pemadam, pemadam biasanya ee itu udah pemadam eee apa namanya nantik kalo bersamaan dengan itu juga dihubungi manager, pimpinan, ha’a.”*

Pada komponen terakhir pelaporan keadaan darurat saat terjadi kebakaran, peneliti menanyakan seberapa cepat respon pihak yang dihubungi saat kebakaran pada SPBU tempat informan bekerja. Adapun respon dari informan sebagai berikut..

Informan 1: *“Pemadam karena kita dekat ya, pasti cepat”*

Informan 2: *“Karena belum pernah dihubungi saya gak tau responnya seberapa cepatnya.”*

Informan 3: *“Nah kalau pihak eksternal belum tau ya karena memang belum pernah dihubungi tetapi untuk eee pihak internal kita baik manager maupun supervisornya karena kami selalu stand by on site jadi ya begitu ada laporan kita pasti akan langsung eee merespon.”*

Informan 4: *“Biasanya, insya Allah cepat ha’a.”*

Dari wawancara mengenai pelaporan keadaan darurat saat kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan melibatkan beberapa langkah kunci dan berbagai pihak terkait. Prosedur pelaporan dimulai dengan menghubungi pemadam kebakaran, dan dalam beberapa situasi, juga melibatkan manajer serta pihak terkait seperti PERTAMINA atau kepolisian. Dalam keadaan darurat, individu yang paling dekat dengan sumber api bertanggung jawab pertama untuk melakukan tindakan pencegahan, sementara regu pemadam bertugas untuk mengendalikan kebakaran dan regu penunjang bertugas melaporkan situasi kepada manajer dan pemadam kebakaran. Koordinasi yang efektif dan respons cepat dari semua pihak sangat penting untuk menangani kebakaran dengan baik. Meskipun informan menunjukkan bahwa pemadam kebakaran umumnya merespons dengan cepat karena kedekatan lokasi, belum ada pengalaman langsung mengenai kecepatan respon pihak eksternal. Secara

keseluruhan, baik pihak internal maupun eksternal diharapkan dapat memberikan respons cepat dalam menghadapi kebakaran.

6.3.6 Sarana dan Prasarana

Untuk menilai kesiapan dan kesesuaian sarana serta prasarana *Emergency Response Plan (ERP)* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan perlengkapan yang mendukung penanggulangan keadaan darurat, khususnya kebakaran. Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil evaluasi terkait sarana dan prasarana di berbagai SPBU, termasuk alat pemadam api, sistem pelaporan kebakaran, dan petunjuk keadaan darurat. Informasi dalam tabel mencakup kuantitas dan kualitas perlengkapan yang ada, serta tingkat kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Tujuan dari tabel ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana SPBU telah memenuhi persyaratan penanggulangan keadaan darurat dan untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan lebih lanjut.

TABEL 6. 3 SARANA DAN PRASARANA *EMERGENCY RESPONSE PLAN*

No	Deskripsi	SPBU A				SPBU B				SPBU C				SPBU D				Catatan
		Kuantitas		Kualitas		kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	APAR (Alat Pemadam Api Ringan) • Tepung kimia kering 9 kg • CO2 4,5 kg • Fire ball ukuran 1,2 kg atau setara (EU Standard) • Terdapat petunjuk cara pemakaian	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	Semua SPBU (PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes) telah memenuhi persyaratan terkait kuantitas dan kualitas APAR. Terdapat petunjuk pemakaian pada alat-alat tersebut.
2	APAB (Alat Pemadam Api Berat) • Tepung kimia kering 80 kg dengan jenis alat beroda • Terdapat	✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓			✓	PT. Coco Sudirman telah memenuhi persyaratan, sementara PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaufi Petroleum, dan PT.

No	Deskripsi	SPBU A				SPBU B				SPBU C				SPBU D				Catatan
		Kuantitas		Kualitas		kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	petunjuk cara pemakaian																	Lampaseh Jaya Montes tidak memiliki APAB yang sesuai dengan standar
3	Instalasi tetap atau otomatis		☑		☑		☑		☑	☑		☑		☑		☑		PT. Sinar Pusaka tidak memiliki instalasi tetap atau otomatis yang sesuai. PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes memiliki instalasi yang sesuai dengan standar.
4	Alat pemadam api diperiksa setiap 6 bulan sekali (hasil dan tanggal pemeriksaan dicantumkan pada	☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		Semua SPBU melakukan pemeriksaan APAR setiap 6 bulan sekali dan mencantumkan hasil serta tanggal

No	Deskripsi	SPBU A				SPBU B				SPBU C				SPBU D				Catatan
		Kuantitas		Kualitas		kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	tabung pemadam/label																	pemeriksaan pada tabung pemadam.
5	Sistem pelaporan kebakaran (telepon keadaan darurat atau bentuk lainnya)	☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		Semua SPBU telah memiliki sistem pelaporan kebakaran yang sesuai.
6	Tombol darurat yang terletak di dekat petugas untuk menghentikan semua kegiatan yang sedang berlangsung dan terintegrasi antara lain dengan dispenser, pompa, lampu dan lainnya	☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		Semua kegiatan yang sedang berlangsung.

No	Deskripsi	SPBU A				SPBU B				SPBU C				SPBU D				Catatan
		Kuantitas		Kualitas		kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
7	Untuk SPBU Swalayan harus dilengkapi dengan sistem pengeras suara untuk komunikasi dengan pelanggan		☑		☑		☑		☑	☑		☑		☑		☑		PT. Sinar Pusaka tidak memiliki sistem pengeras suara yang sesuai, sedangkan SPBU lainnya
8	Petunjuk dan informasi keadaan darurat																	Semua SPBU telah memasang petunjuk dan informasi keadaan darurat dengan tampilan yang mencolok, terlihat, dan mudah dipahami.
	• Telepon petunjuk yang memuat nama dan alamat SPBU dan petugas yang bisa dihubungi jika terjadi keadaan darurat	☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		
	• Pada titik dispenser dipasang informasi dengan tampilan mengenai tindakan yang diambil jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat	☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		☑		

No	Deskripsi	SPBU A				SPBU B				SPBU C				SPBU D				Catatan
		Kuantitas		Kualitas		kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		Kuantitas		Kualitas		
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	• Petunjuk titik kumpul		☑		☑		☑		☑	☑		☑			☑		☑	
	• Rute evakuasi		☑		☑		☑		☑	☑		☑			☑		☑	
	Note: Semua informasi harus mencolok, terlihat dan mudah dipahami																	

Tabel berikut memberikan gambaran menyeluruh mengenai evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan keadaan darurat, khususnya kebakaran, di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua SPBU, yaitu PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaafi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes, telah memenuhi standar terkait kuantitas dan kualitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang mencakup tepung kimia kering 9 kg, CO₂ 4,5 kg, fire ball ukuran 1,2 kg, serta adanya petunjuk cara pemakaian yang jelas. Namun, PT. Coco Sudirman merupakan satu-satunya yang memenuhi standar untuk Alat Pemadam Api Berat (APAB), sementara PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaafi Petroleum, dan PT. Lampaseh Jaya Montes tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk instalasi tetap atau otomatis, hanya PT. Sinar Pusaka yang tidak memiliki instalasi sesuai standar, sementara yang lainnya memenuhinya. Semua SPBU memastikan bahwa alat pemadam api diperiksa setiap 6 bulan dan hasil pemeriksaan dicantumkan pada tabung pemadam. Sistem pelaporan kebakaran juga sudah diterapkan dengan baik di seluruh SPBU. Selain itu, tombol darurat yang terintegrasi dengan dispenser, pompa, lampu, dan peralatan lainnya tersedia di semua lokasi. Pada SPBU Swalayan, PT. Sinar Pusaka adalah satu-satunya yang belum memiliki sistem pengeras suara untuk komunikasi dengan pelanggan. Semua SPBU telah memasang petunjuk dan informasi keadaan darurat yang jelas, mencolok, dan mudah dipahami, termasuk informasi telepon darurat, petunjuk tindakan pada titik dispenser, petunjuk titik kumpul, dan rute evakuasi.

6.4 Pembahasan

6.4.1 Penerapan *Emergency Response Plan*

Penerapan Emergency Response Plan (ERP) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menunjukkan variasi dalam manajemen, SOP, dan pelaksanaan tindakan pengendalian bahaya kebakaran. Di SPBU PT. Sinar Pusaka, manajer mengakui bahwa penerapan manajemen ERP masih kurang dan mereka tidak memiliki SOP yang jelas, termasuk tidak adanya titik kumpul darurat. Namun, petugas diharapkan siap dengan alat pemadam. Di SPBU PT. Asny Syaufi Petroleum, meskipun belum ada SOP tertulis, perusahaan telah menyediakan banyak APAR dan nomor telepon darurat, serta para operator telah dilatih untuk menggunakan APAR.

SPBU PT. Coco Sudirman menampilkan penerapan ERP yang lebih baik dengan adanya struktur organisasi tanggap darurat yang melibatkan seluruh pekerja, di mana setiap anggota memiliki tugas khusus dalam situasi darurat. Mereka juga memiliki SOP yang terstruktur dengan baik dan tindakan pengendalian bahaya kebakaran yang dianggap optimal oleh pengawas lapangan. Sementara itu, di SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes, meskipun belum pernah mengalami kebakaran, mereka memiliki SOP yang mencakup penghentian penjualan, pelaporan ke pihak terkait, dan penggunaan APAR oleh operator. Pengawas lapangan menekankan pentingnya respon cepat dan komunikasi dengan pemadam kebakaran serta pihak berwenang lainnya.

Keseluruhan wawancara ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam kesiapan dan pelaksanaan ERP di berbagai SPBU, dengan beberapa memiliki sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir dibandingkan yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan standarisasi dalam

penerapan ERP di SPBU agar dapat mencapai tingkat kesiapan yang lebih optimal dan konsisten.

Penerapan *Emergency Response Plan* (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKM) yang wajib dimiliki setiap Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak. SMKM harus mencakup kebijakan dan komitmen manajemen yang jelas untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan mitigasi potensi bahaya seperti kebakaran. Selain itu, manajemen operasional yang baik harus diikuti dengan prosedur standar operasional (SOP) untuk tanggap darurat, Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, SPBU dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat, melindungi keselamatan karyawan dan pelanggan, serta memperkuat pengelolaan risiko secara keseluruhan (Health and Guidebook, 2018).

6.4.2 Organisasi *Emergency Response Plan*

Berdasarkan wawancara diatas dengan empat SPBU mengenai organisasi *Emergency Response Plan* (ERP) dan penanggulangan bencana kebakaran, ditemukan variasi dalam pendekatan dan kesiapan masing-masing SPBU. Adapun pada SPBU PT. Sinar Pusaka, tidak ada unit atau organisasi khusus untuk penanggulangan bencana kebakaran, sehingga tidak ada penilaian kinerja tim yang spesifik. Di SPBU PT. Asny Syaufi Petroleum, tidak ada unit khusus yang ditetapkan dimana operator langsung menangani situasi darurat sesuai SOP, dan seluruh karyawan terlibat dalam

penanggulangan bencana. Pengawas lapangan menilai bahwa karyawan memahami tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.

Adapun SPBU PT. Coco Sudirman memiliki struktur organisasi khusus untuk tanggap darurat yang melibatkan seluruh pekerja. Mereka melakukan simulasi tanggap darurat untuk memastikan kesiapan pekerja, dan hasilnya menunjukkan bahwa pekerja memiliki pengetahuan yang memadai untuk menangani situasi darurat. Sedangkan, SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes, tidak ada struktur formal untuk penanggulangan bencana dimana semua karyawan harus berperan aktif dalam situasi darurat. Pengawas lapangan menilai kinerja tim ERP sebagian baik, menekankan pentingnya respon cepat dan komunikasi dengan pihak terkait. Hasil wawancara terkait organisasi ERP ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap ERP di SPBU bervariasi, dengan beberapa mengandalkan keterlibatan kolektif tanpa struktur formal, sementara yang lain melakukan pelatihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan

Setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan untuk memiliki organisasi tanggap darurat yang ditandatangani oleh pengelola SPBU, sebagai bagian penting dari penerapan Emergency Response Plan (ERP). Organisasi ini harus terdiri minimal dari penanggung jawab keselamatan, yang didukung oleh fungsi bantuan, pemadam kebakaran, penunjang, dan penyelamat. Masing-masing anggota organisasi harus memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka untuk memastikan respons yang efektif saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, struktur organisasi ini perlu disosialisasikan kepada seluruh personil terkait dan dipasang di lokasi yang mudah dilihat, sehingga semua karyawan dapat segera

mengakses informasi penting ini saat situasi darurat terjadi (Health and Guidebook, 2018).

6.4.3 Penanggulangan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan*

Berdasarkan wawancara diatas, penanggulangan tanggap darurat Emergency Response Plan (ERP) di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menunjukkan beberapa aspek penting, seperti pembuatan dokumentasi, perencanaan prosedur, dan pengendalian risiko kebakaran. Di SPBU PT Sinar Pusaka, tanggung jawab pembuatan dokumentasi ERP dipegang oleh pengawas. Namun, mereka belum memiliki perencanaan prosedur atau pengendalian risiko yang konkret karena hingga saat ini belum pernah mengalami kejadian bahaya.

Di SPBU PT. Asny Syaufi Petroleum, mereka juga tidak memiliki SOP tertulis untuk perencanaan prosedur. Namun, perusahaan telah memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada karyawan melalui pihak eksternal. Pengawas lapangan menjelaskan bahwa dokumentasi terkait ERP dapat disusun oleh manajer atau pengawas ketika terjadi insiden, yang memastikan adanya kesiapan untuk merespons situasi darurat. Sebaliknya, SPBU PT. Coco Sudirman menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik. Mereka memiliki tim HSE di kantor pusat yang bertugas menyusun prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko. Informasi ini disampaikan kepada seluruh pekerja melalui briefing dan simulasi OKD. Pengawas lapangan menegaskan bahwa struktur organisasi tanggap darurat mereka telah mapan, dengan pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim. Sementara itu, di SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes, pembuatan dokumentasi dan prosedur identifikasi potensi bahaya masih kurang jelas. Penanganannya mengacu pada pedoman umum

dan briefing harian. Pengawas lapangan mengakui adanya kesulitan dalam menyusun rencana pengendalian risiko secara rinci, namun mereka berusaha memberikan arahan dan himbauan berdasarkan pengalaman lapangan yang ada.

Penanggulangan tanggap darurat Emergency Response Plan (ERP) di empat SPBU menunjukkan perbedaan dalam kesiapan dan pendekatan. SPBU PT. Sinar Pusaka belum memiliki dokumentasi dan prosedur yang jelas, sehingga respon terhadap situasi darurat masih lemah. SPBU PT. Asny Syaafi Petroleum juga tidak memiliki SOP tertulis, tetapi telah melakukan pelatihan mitigasi bencana melalui pihak eksternal. Sebaliknya, SPBU PT. Coco Sudirman memiliki tim HSE yang aktif menyusun prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta melakukan briefing dan simulasi, menjadikannya lebih siap dalam menghadapi keadaan darurat. Sementara itu, SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes mengalami kekurangan dalam pembuatan dokumentasi dan prosedur, mengandalkan pedoman umum. Kesimpulannya, SPBU PT. Coco Sudirman menunjukkan struktur dan kesiapan ERP yang paling baik, sementara yang lain masih memerlukan perbaikan signifikan untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat.

Manajemen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan prosedur tanggap darurat yang ditetapkan oleh Kepala Teknik, guna menghadapi berbagai kemungkinan darurat yang dapat terjadi. Hal ini mencakup penyediaan sarana tanggap darurat, seperti alat penanggulangan kebakaran dan sistem komunikasi, serta jalur penyelamatan dan titik berkumpul yang dilengkapi dengan rambu-rambu yang jelas dan tidak terhalang. Informasi terkait keadaan darurat, termasuk kontak pihak berwenang, harus disediakan dan dijaga

agar selalu *up-to-date*. Prosedur tertulis yang menjelaskan tanggung jawab dan tindakan yang tepat untuk kondisi normal dan darurat harus tersedia untuk seluruh pekerja, dengan opsi untuk menyusun prosedur terpisah demi kemudahan pemahaman. Seluruh prosedur tersebut harus ditinjau dan disempurnakan secara berkala, terutama jika ada perubahan dalam regulasi atau pengalaman dari insiden yang terjadi. Pemasangan rambu peringatan untuk konsumen dan informasi keselamatan bagi pekerja di lokasi yang strategis juga sangat penting. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini dalam *Emergency Response Plan* (ERP), SPBU dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas respons terhadap keadaan darurat, sehingga melindungi keselamatan karyawan, pelanggan, dan properti (Health and Guidebook, 2018).

6.4.4 Pelatihan Tanggap Darurat *Emergency Response Plan*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pelatihan tanggap darurat *Emergency Response Plan* (ERP) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terdapat perbedaan mencolok dalam pendekatan dan frekuensi pelatihan antara masing-masing SPBU. Di SPBU PT. Sinar Pusaka, meskipun ada pelatihan yang dilakukan setahun sekali, keberadaan program pelatihan yang tidak rutin dan kurangnya pembaruan dalam drilling tanggap darurat bisa mengurangi efektivitas kesiapan dalam menghadapi situasi darurat.

Sementara itu, SPBU PT. Asny Syaufi Petroleum menunjukkan pendekatan yang lebih terorganisir dengan pelatihan yang dilakukan oleh pihak eksternal, termasuk pemadam kebakaran. Meskipun pelatihan bergilir setiap tahun memberikan kesempatan bagi operator untuk terus belajar, tidak adanya SOP tertulis

dapat menjadi penghalang dalam konsistensi penanganan situasi darurat. Adapun di SPBU PT. Coco Sudirman menonjol dengan pendekatan paling komprehensif. Pelatihan yang melibatkan seluruh pekerja secara berkala menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesiapan. Penegakan pelatihan untuk pekerja baru sebelum mulai bekerja menunjukkan investasi yang signifikan dalam membangun budaya keselamatan. Pemberian piagam penghargaan menambah motivasi dan penghargaan bagi karyawan, memperkuat keinginan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan tanggap darurat.

SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes juga melakukan pelatihan dua kali setahun, tetapi pelatihan yang lebih praktis dengan membakar bahan bakar dan ban bekas untuk simulasi pemadaman kebakaran menunjukkan inovasi dalam pelatihan. Namun, tanpa struktur dan prosedur yang jelas, efektivitas pelatihan ini bisa dipertanyakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam program pelatihan ERP di SPBU mencerminkan perbedaan dalam komitmen dan kesiapan terhadap penanganan keadaan darurat. SPBU PT. Coco Sudirman jelas lebih unggul dalam hal struktur dan keterlibatan karyawan, sementara SPBU lain masih perlu meningkatkan konsistensi dan dokumentasi pelatihan mereka. Standarisasi program pelatihan darurat di seluruh SPBU sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan respon terhadap kebakaran dan situasi darurat lainnya, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa dan properti.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan untuk melaksanakan latihan tanggap darurat secara berkala, minimal sekali setahun, yang melibatkan

seluruh pekerja dalam tim tanggap darurat. Latihan ini harus mencakup simulasi baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan pihak terkait di luar organisasi SPBU, seperti pemadam kebakaran dan lembaga penanggulangan bencana. Dokumentasi dan catatan dari setiap sesi pelatihan harus disimpan dengan baik untuk memastikan bahwa semua prosedur dan hasil latihan dapat diakses dan ditinjau di masa depan. Kegiatan ini sangat penting dalam konteks Pelatihan Tanggap Darurat dalam *Emergency Response Plan* (ERP), karena membantu meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat, memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memperkuat koordinasi antara SPBU dan pihak eksternal dalam situasi darurat (Health and Guidebook, 2018).

6.4.5 Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaporan keadaan darurat saat kebakaran di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terdapat perbedaan signifikan dalam proses dan kesiapan respon terhadap situasi darurat. Di SPBU PT. Sinar Pusaka, pelaporan dilakukan secara langsung kepada pemilik tanpa adanya prosedur yang jelas, dan pemadam kebakaran dihubungi sebagai pihak pertama karena kedekatannya, yang menjamin respon yang cepat. Namun, kurangnya prosedur formal ini bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam penanganan keadaan darurat yang lebih serius. Di SPBU PT. Asny Syaufi Petroleum, meskipun terdapat nomor khusus untuk pelaporan darurat, kekurangan pengalaman dalam menghadapi kebakaran membuat mereka belum bisa menilai kecepatan respon dari pemadam kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah awal yang diambil, kesiapan untuk situasi nyata masih perlu ditingkatkan.

SPBU PT. Coco Sudirman menunjukkan pendekatan yang paling terstruktur, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pemadam, penyelamat, dan penunjang. Prosedur yang ditetapkan memastikan bahwa tindakan awal ditangani dengan cepat oleh individu terdekat dengan sumber api, diikuti oleh tim pemadam yang berupaya mencegah penyebaran. Respon internal yang cepat menunjukkan kesiapan yang lebih baik dibandingkan SPBU lainnya, meskipun respon pihak eksternal belum teruji. Adapun SPBU PT. Lampaseh Jaya Montes, pelaporan juga dilakukan kepada pemadam kebakaran, diikuti oleh manajer dan pihak terkait lainnya, dengan pengakuan bahwa respon pemadam kebakaran biasanya cepat. Namun, tanpa adanya struktur yang terdefinisi dengan baik, prosedur ini masih bisa ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa SPBU telah mengadopsi langkah-langkah untuk menangani keadaan darurat, masih ada kebutuhan mendesak untuk standarisasi prosedur pelaporan di seluruh SPBU. Standarisasi ini penting untuk memastikan bahwa respons terhadap kebakaran dilakukan dengan cepat dan efektif, mengurangi risiko serta meminimalkan dampak dari kejadian kebakaran. Implementasi prosedur yang jelas akan membantu semua karyawan mengetahui tindakan yang harus diambil, serta mempercepat komunikasi dengan pihak pemadam kebakaran dan otoritas lainnya, sehingga dapat meningkatkan keselamatan di area SPBU.

Setiap kejadian kecelakaan, kebakaran, atau insiden lainnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wajib dilaporkan segera kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pelaporan yang cepat dan

akurat ini sangat penting dalam konteks pelaporan keadaan darurat saat terjadi kebakaran, karena dapat memfasilitasi respon yang efisien dari pihak berwenang dan membantu dalam pengelolaan situasi darurat. Selain itu, salinan dari laporan tersebut harus disimpan dengan baik di SPBU dan siap ditunjukkan bila diperlukan, sehingga memudahkan evaluasi dan tindak lanjut setelah insiden. Dengan demikian, sistem pelaporan yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung peningkatan keselamatan dan efektivitas tanggap darurat di masa mendatang (Health and Guidebook, 2018).

6.4.6 Sarana dan Prasarana *Emergency Response Plan*

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk Emergency Response Plan di empat SPBU, yaitu PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti alat pemadam api, sistem pelaporan kebakaran, dan fasilitas keselamatan lainnya.

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Semua SPBU yang diperiksa, yaitu PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes, telah memenuhi persyaratan terkait kuantitas dan kualitas APAR. Masing-masing SPBU memiliki APAR dengan jenis tepung kimia kering 9 kg, CO₂ 4,5 kg, dan fire ball ukuran 1,2 kg atau setara sesuai dengan standar EU. Selain itu, alat-alat tersebut dilengkapi dengan petunjuk pemakaian yang jelas dan mudah dipahami, memastikan penggunaan yang efektif saat keadaan darurat.



Gambar 6. 1 Pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 kg

Setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran yang siap pakai dalam jumlah memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Evaluasi menunjukkan bahwa semua SPBU yang diperiksa telah memenuhi persyaratan ini dengan menyediakan APAR yang terdiri dari tepung kimia kering 9 kg, CO₂ 4,5 kg, dan fire ball berukuran 1,2 kg atau setara dengan standar EU. Selain itu, seluruh alat pemadam dilengkapi dengan petunjuk pemakaian yang jelas, sehingga memastikan peralatan tersebut dapat digunakan secara efektif dalam situasi darurat. Dengan demikian, semua SPBU tersebut telah mematuhi standar peralatan pemadam kebakaran yang ditetapkan (Health and Guidebook, 2018)

2. Alat Pemadam Api Berat (APAB)

Ketersediaan APAB juga menjadi parameter penting dalam penilaian ini. PT. Coco Sudirman telah memenuhi persyaratan dengan menyediakan APAB jenis beroda dengan tepung kimia kering 80 kg serta petunjuk cara pemakaian. Namun, PT. Sinar Pusaka, PT. Asny Syaufi Petroleum, dan PT. Lampaseh Jaya Montes tidak memiliki

APAB yang sesuai dengan standar, yang merupakan kekurangan signifikan dalam kesiapan darurat mereka.



Gambar 6. 2 Pengecekan Alat Pemadam Api Berat 80 kg

Jenis dan kapasitas alat pemadam kebakaran harus sesuai dengan klasifikasi kebakaran yang ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1980, di mana salah satu alat yang umum digunakan adalah tepung kimia kering dengan kapasitas 80 kg, yang biasanya beroda untuk kemudahan penggunaan dalam situasi darurat. Ketersediaan alat pemadam kebakaran (APAB) juga merupakan parameter penting dalam penilaian kesiapan darurat (Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 1980).

3. Instalasi Tetap atau Otomatis

Dalam hal instalasi tetap atau otomatis yang dirancang untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran, PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes memiliki instalasi yang sesuai dengan standar. Di sisi lain, PT. Sinar Pusaka tidak memiliki instalasi tetap atau otomatis yang sesuai, yang menunjukkan kurangnya persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran.



Gambar 6. 3 Instalasi Tetap dan Otomatis

Dalam hal instalasi tetap atau otomatis yang dirancang untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran, PT. Asny Syaufi Petroleum, PT. Coco Sudirman, dan PT. Lampaseh Jaya Montes telah memenuhi standar yang ditetapkan, menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan kerja. Mereka memiliki sistem yang efektif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenaker No. 02/MEN/1983, yang membagi alarm kebakaran menjadi dua jenis: manual dan otomatis. Sistem otomatis dapat mendeteksi api dan memberikan tanda tanpa campur tangan manusia, yang sangat penting dalam situasi darurat. Di sisi lain, PT. Sinar Pusaka tidak memiliki instalasi tetap atau otomatis yang sesuai, yang menunjukkan kurangnya persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran. Hal ini mencerminkan risiko yang lebih tinggi bagi keselamatan karyawan dan aset perusahaan, mengingat pentingnya sistem alarm yang memberikan sinyal baik secara audibel maupun visual untuk meningkatkan respons terhadap kebakaran (Ruslan, Al-Amin and Emidiana, 2021).

4. Pemeriksaan Berkala Alat Pemadam Api

Pemeriksaan berkala alat pemadam api merupakan bagian dari standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh setiap SPBU. Berdasarkan penilaian, semua

SPBU melakukan pemeriksaan APAR setiap enam bulan sekali. Hasil dan tanggal pemeriksaan juga dicantumkan pada tabung pemadam atau label, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang ketat.



Gambar 6. 4 Pemeriksaan Berkala Alat Pemadam Api

Pemeriksaan berkala alat pemadam api (APAR) merupakan bagian penting dari standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh setiap SPBU. Semua SPBU melakukan pemeriksaan APAR setiap enam bulan sekali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenaker No. 4 Tahun 1980, yang mewajibkan setiap alat pemadam api untuk diperiksa secara rutin. Hasil dan tanggal pemeriksaan dicantumkan pada tabung pemadam atau label, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang ketat. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan kondisi fisik alat, tekanan dalam tabung, serta kelengkapan dan fungsionalitas alat pemadam api tersebut. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, SPBU dapat memastikan bahwa alat pemadam api selalu dalam kondisi siap pakai, sehingga dapat meminimalkan risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja (Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 1980).

5. Sistem Pelaporan Kebakaran

Semua SPBU yang diperiksa telah memiliki sistem pelaporan kebakaran yang sesuai. Sistem ini meliputi telepon keadaan darurat atau bentuk lain yang memungkinkan pelaporan cepat jika terjadi kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa semua SPBU telah siap dalam hal komunikasi dan pelaporan darurat, yang sangat penting untuk respons cepat terhadap insiden kebakaran.



Gambar 6. 5 Nomor Sistem Pelaporan Kebakaran

6. Tombol Darurat dan Sistem Penghentian Kegiatan

Setiap SPBU juga dilengkapi dengan tombol darurat yang terletak di dekat petugas, yang terintegrasi dengan dispenser, pompa, lampu, dan lainnya untuk menghentikan semua kegiatan yang sedang berlangsung dalam situasi darurat. Ini menunjukkan bahwa semua SPBU telah mempertimbangkan aspek keamanan untuk menghentikan operasi secara cepat guna mengurangi risiko yang lebih besar.



Gambar 6. 6 Tombol Darurat dan Sistem Pemberhentian Kegiatan

Setiap SPBU harus dilengkapi dengan tombol darurat yang ditempatkan di area strategis dekat petugas. Tombol ini terhubung dengan berbagai perangkat seperti dispenser, pompa, lampu, dan sistem lainnya, yang berfungsi untuk menghentikan semua operasi dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa setiap SPBU telah memperhitungkan aspek keselamatan untuk segera menghentikan kegiatan guna meminimalkan risiko lebih lanjut. Sebagaimana diatur dalam regulasi, tombol darurat di SPBU sangat penting untuk memastikan tindakan cepat dalam menghadapi situasi berbahaya, guna melindungi seluruh orang yang berada di Lokasi (Health and Guidebook, 2018).

7. Sistem Pengeras Suara untuk SPBU Swalayan

Untuk SPBU yang beroperasi secara swalayan, sistem pengeras suara sangat penting untuk komunikasi dengan pelanggan selama keadaan darurat. PT. Sinar Pusaka tidak memiliki sistem pengeras suara yang sesuai, sementara SPBU lainnya telah dilengkapi dengan sistem yang memadai. Kekurangan ini menunjukkan potensi risiko dalam hal komunikasi dengan pelanggan saat terjadi keadaan darurat di PT. Sinar Pusaka.

8. Petunjuk dan Informasi Keadaan Darurat

Semua SPBU telah memasang petunjuk dan informasi keadaan darurat yang mencolok, terlihat, dan mudah dipahami. Setiap SPBU menyediakan telepon petunjuk yang memuat nama dan alamat SPBU serta petugas yang bisa dihubungi jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, informasi tentang tindakan yang harus diambil jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat dipasang di titik dispenser. Namun, PT. Sinar Pusaka tidak menyediakan petunjuk titik kumpul dan rute evakuasi yang sesuai, yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kekurangan, sebagian besar SPBU yang diperiksa telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ketat, yang penting untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat dan melindungi keselamatan karyawan serta pelanggan.

Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di SPBU sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran, mengingat bahan bakar yang mudah terbakar. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018, SPBU wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang siap pakai, seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), instalasi tetap, dan otomatis, yang harus ditempatkan di lokasi strategis sesuai dengan potensi kebakaran. Perawatan dan pemeriksaan rutin alat pemadam kebakaran juga penting untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik. Selain itu, SPBU harus memiliki sistem pelaporan kebakaran yang efektif, seperti telepon darurat, serta sarana darurat lain seperti tombol darurat untuk menghentikan operasi jika terjadi kebakaran. Bagi SPBU swalayan, disarankan memiliki sistem pengeras suara untuk komunikasi darurat dengan pelanggan.

Petunjuk dan informasi darurat harus dipasang di tempat yang mudah terlihat, termasuk di setiap titik dispenser, untuk memastikan semua orang mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kebakaran. Keseluruhan sistem ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan dampak kebakaran, sehingga kepatuhan terhadap standar keselamatan dan pengawasan berkelanjutan sangat penting dalam menjaga keselamatan di SPBU (Health and Guidebook, 2018).

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini akan merangkum temuan-temuan kunci dan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Emergency Response Plan: Ada perbedaan besar dalam penerapan ERP di berbagai SPBU. SPBU PT. Coco Sudirman menunjukkan implementasi ERP yang paling baik dengan adanya struktur organisasi tanggap darurat yang jelas dan SOP yang terstruktur. SPBU PT. Sinar Pusaka dan PT. Asny Syaufi Petroleum memiliki kekurangan dalam dokumentasi dan SOP, sementara PT. Lampaseh Jaya Montes menunjukkan adanya SOP tetapi tanpa pengalaman langsung dalam kejadian kebakaran.
2. Organisasi Emergency Response Plan: Variasi juga tampak dalam organisasi ERP di SPBU. SPBU PT. Coco Sudirman memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pelatihan dan simulasi rutin. Sebaliknya, SPBU PT. Sinar Pusaka dan PT. Asny Syaufi Petroleum mengandalkan keterlibatan kolektif tanpa struktur formal yang jelas, sementara PT. Lampaseh Jaya Montes tidak memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik.
3. Penanggulangan Tanggap Darurat: Perbedaan dalam dokumentasi dan prosedur penanggulangan tanggap darurat terlihat antara SPBU. SPBU PT.

Coco Sudirman menunjukkan kesiapan yang lebih baik dengan tim HSE dan prosedur yang jelas, sedangkan SPBU lainnya, seperti PT. Sinar Pusaka dan PT. Asny Syaufi Petroleum, masih kurang dalam hal dokumentasi dan prosedur formal.

4. Pelatihan Tanggap Darurat: SPBU PT. Coco Sudirman unggul dalam hal pelatihan dengan frekuensi dan kualitas yang baik, termasuk pelatihan untuk pekerja baru dan pemberian piagam penghargaan. Sebaliknya, SPBU lain menunjukkan perbedaan dalam frekuensi dan kualitas pelatihan, dengan beberapa seperti PT. Sinar Pusaka yang memiliki program pelatihan yang kurang rutin.
5. Pelaporan Keadaan Darurat: Struktur dan kesiapan pelaporan keadaan darurat juga bervariasi. SPBU PT. Coco Sudirman memiliki sistem pelaporan yang paling terstruktur, sementara SPBU lain, termasuk PT. Sinar Pusaka, masih perlu memperbaiki prosedur pelaporan dan komunikasi dalam keadaan darurat.
6. Sarana dan Prasarana: Semua SPBU memenuhi persyaratan dasar untuk alat pemadam api, sistem pelaporan kebakaran, dan tombol darurat. Namun, terdapat kekurangan pada beberapa SPBU seperti PT. Sinar Pusaka yang tidak memiliki sistem pengeras suara dan petunjuk titik kumpul yang sesuai.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan penerapan Emergency Response Plan (ERP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU):

1. Standarisasi dan Dokumentasi *Emergency Response Plan* di SPBU perlu menyusun dan menerapkan dokumentasi ERP yang jelas dan terstruktur. Standarisasi prosedur dan dokumentasi di seluruh SPBU akan meningkatkan kesiapan dan efektivitas dalam menghadapi keadaan darurat.
2. Peningkatan Organisasi Tanggap Darurat di setiap SPBU harus memiliki struktur organisasi tanggap darurat yang jelas, termasuk penunjukan tanggung jawab yang spesifik. Sosialisasi struktur organisasi ini kepada seluruh karyawan sangat penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam situasi darurat.
3. Perbaikan Prosedur dan Pelatihan di pelatihan tanggap darurat harus dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh karyawan. SPBU disarankan untuk melakukan simulasi rutin dan melibatkan pihak eksternal, seperti pemadam kebakaran, untuk meningkatkan kesiapan dan keterampilan karyawan dalam menghadapi situasi darurat.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di SPBU harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan standar. Ini termasuk memastikan adanya alat pemadam api berat (APAB) yang sesuai, sistem pengeras suara untuk SPBU swalayan, dan petunjuk serta informasi keadaan darurat yang jelas dan mudah diakses.
5. Peningkatan Sistem Pelaporan di standarisasi prosedur pelaporan darurat harus diterapkan di seluruh SPBU. Prosedur pelaporan yang cepat dan akurat sangat

penting untuk memfasilitasi respons yang efisien dari pihak berwenang dan mengurangi dampak kebakaran.

6. Bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masa depan, disarankan untuk memproses surat izin penelitian dengan lebih cepat agar penelitian dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affuwani, N., Amiruddin, J. and Yoga, N.G. (2021) 'Analysis of Risk and Loss of Fire and Explosion on the Pertamina Tank at Public Fuel Filling Station (Spbu) X Using Dow's Fire And Explosion Index Method', 4, pp. 13–22.
- Aji, F. (2020) *Evaluasi Kesiapsiagaan Pra dan Saat Kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Jember*. Available at: [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101459%0Ahttps://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/101459/WAHYU FEBRIYANTO AJI - 152110101089.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101459%0Ahttps://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/101459/WAHYU%20FEBRIYANTO%20AJI%20-%20152110101089.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- BPBD (2021) *MENGENAL BENCANA KEBAKARAN*, *bpbd.kulonprogokab*. Available at: <https://bpbd.kulonprogokab.go.id/detil/139/mengenal-bencana-kebakaran>.
- Busra, F., Apgani, M.J. Al and Lestari, R. (2023) 'Perencanaan Emergency Response Plan (ERP) dan Penentuan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Office PT. Putra Perkasa Abadi', *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 4(2), pp. 113–120. Available at: <https://doi.org/10.25077/jk3l.4.2.113-120.2023>.
- Dirjen Minyak dan Gas Bumi (2018) 'Berita Negara', *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(1496), pp. 1–13.
- Gorendra gori, A. (2020) 'Analisis Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sarana Penyelamatan dalam Upaya Program Emergency Response Plan di Jakarta Eye Center Kedoya Tahun 2020'.
- Health, O. and Guidebook, S. (2018) *Occupational Health and Safety Guidebook*.
- Jihan, I. (2020) 'Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Terhadap Kualitas Pelayanan Di Spbu 44.551.17 Kota Yogyakarta'.
- Kementerian ESDM Dirjen Migas (2020) 'ATLAS Keselamatan Migas Zero Unplanned Shutdown Zero Fatality', *Vol.3*, 3, pp. 1–218.
- Lestari, A.M., Indrayani, R. and Akbar, K.A. (2019) 'Gambaran Sarana Proteksi Aktif Kebakaran Dan Kepatuhan Konsumen Pada Tanda Dan Rambu Peringatan Di SPBU Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran', *Ikesma*, p. 93. Available at: <https://doi.org/10.19184/ikesma.v15i2.17546>.
- Lestari, F. (2021) *Keselamatan Kebakaran (Fire Safety)*.
- Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1980) 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan', *Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 1(1), pp. 1–15. Available at: <https://temank3.kemnaker.go.id/public/media/files/20210725225505.pdf>.

- Mursyadi, A. (2016) 'Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung di Singkawang', *Jurnal Teknik Sipil*, 16(1), pp. 503–510. Available at: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/view/24380>.
- My Pertamina (2021) *Jenis dan Harga BBM Pertamina yang Berkualitas dan Bikin Mesin Awet*, *Mypertamina.id*. Available at: <https://mypertamina.id/jenis-dan-harga-bbm-pertamina-yang-berkualitas-dan-bikin-mesin-awet>.
- Peraturan Pemerintah RI (2012) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 66, pp. 37–39.
- Rathnayake, I. (2020) 'Machine Translated by Google Machine Translated by Google Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Insiden Kebakaran Gedung : Sebuah tinjauan RMDIM Rathnayake , P . Sridarran dan MDTE Abeynayake Departemen Ekonomi Bangunan Universitas Moratuwa Moratuwa ',.
- Riadi, M. (2018) *Teori Api, Tahapan Kebakaran dan Cara Pemadaman*, *kajianpustaka.com*. Available at: <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/teori-api-dan-tahapan-kebakaran-dan-cara-pemadaman.html> (Accessed: 2 May 2024).
- Ruliyanta and Setyadi, W. (2022) 'Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan di Gedung Baru Inalum', 3(2), pp. 71–76. Available at: <http://jurnal.iaii.or.id/index.php/JAMTEKNO>.
- Ruslan, M., Al-Amin, M.S. and Emidiana, E. (2021) 'Perancangan Sistem Fire Alarm Kebakaran Pada Gedung Laboratorium XXX', *Jurnal Tekno*, 18(2), pp. 51–61. Available at: <https://doi.org/10.33557/jtekno.v18i2.1412>.
- Sa'adah, M., Rahmayati, G.T. and Prasetyo, Y.C. (2022) 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), pp. 61–62. Available at: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>.
- Sosa, A. (2007) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA', 12(235), p. 245. Available at: [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- suryani, ida (2021) 'ANALISIS IMPLEMENTASI EMERGENCY RESPONSE PLAN KEBAKARAN DI HOTEL X PALEMBANG ANALISIS IMPLEMENTASI EMERGENCY RESPONSE PLAN KEBAKARAN'.
- Syaefudin, T.L., Kawatu, P.A.T. and Maddusa, S.S. (2018) 'Analisis Penerapan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT.Pertamina Termibal Bahan Bakar Minyak Bintang', *Jurnal KESMAS*, 7(5), pp. 1–7.
- Yakub, M. and Phuspa, S.M. (2019) 'MANAJEMEN RISIKO KEBAKARAN PADA PT

PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD SUKOWATI Universitas Darussalam Gontor FIRE RISK MANAGEMENT AT PT PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD dimana Pekerjaan utama PT Pertamina EP adalah', *Journal of Industrial Hygiene and Occupational* ..., 3(2). Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/235573650.pdf>.

Yulianto, B. and Tejamaya, M. (2022) 'Analisa Tingkat Risiko Terjadinya Kebakaran dan Ledakan pada Kegiatan Unloading Bahan Bakar Minyak dari Mobil Tangki di SPBU', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(04), pp. 366–379. Available at: <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i04.2016>.

Yusuf, A. and Koto, A.G. (2020) 'ANALISIS SEBARAN LOKASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KABUPATEN GORONTALO (Distribution Analysis of The Location of Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Gorontalo District)', *Jurnal Sains Informasi Geografis*, 3(2), p. 108. Available at: <https://doi.org/10.31314/jsig.v3i2.662>.

PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD SUKOWATI Universitas Darussalam Gontor FIRE RISK MANAGEMENT AT PT PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD dimana Pekerjaan utama PT Pertamina EP adalah', *Journal of Industrial Hygiene and Occupational ...*, 3(2). Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/235573650.pdf>.

Yulianto, B. and Tejamaya, M. (2022) 'Analisa Tingkat Risiko Terjadinya Kebakaran dan Ledakan pada Kegiatan Unloading Bahan Bakar Minyak dari Mobil Tangki di SPBU', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(04), pp. 366–379. Available at: <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i04.2016>.

Yusuf, A. and Koto, A.G. (2020) 'ANALISIS SEBARAN LOKASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KABUPATEN GORONTALO (Distribution Analysis of The Location of Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Gorontalo District)', *Jurnal Sains Informasi Geografis*, 3(2), p. 108. Available at: <https://doi.org/10.31314/jsig.v3i2.662>.

LAMPIRAN I

INFORMASI KEPADA RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Saya Putra Rizki Aulia, atas nama peneliti mahasiswa tingkat akhir pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh bermaksud mengadakan penelitian mengenai **“ANALISIS IMPLEMENTASI *EMERGENCY RESPONSE PLAN* (ERP) UNTUK KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024”**. Dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui mengenai *emergency response plan* apa yang cocok saat terjadi kebakaran pada SPBU yang ada di Kota Banda Aceh.

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Sdr (i) dalam penelitian ini adalah secara sukarela dan menguntungkan semua pihak baik responden, peneliti, instansi dan Masyarakat luas. Setelah anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan menandatangani pernyataan persetujuan responden, maka anda akan sudi untuk dapat meluangkan waktu dan memberikan dukungan kepada saya sebagai peneliti. Semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dirahasiakan oleh tim peneliti dan tidak terbuka bagi masyarakat atau pihak lain tanpa persetujuan peneliti. Laporan yang akan dihasilkan dari penelitian ini akan mencantumkan identitas responden yang bersangkutan.

Demikian informasi kami sampaikan, terima kasih atas kesediaan anda menjadi responden.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

LAMPIRAN II

PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

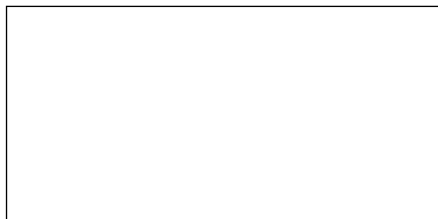
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan, maka saya bersedia untuk dihubungi kembali.

Banda Aceh, / /2024

Responden

Nama :

Tanda tangan :



Peneliti

Nama :

Tanda Tangan :



SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
TERAKREDITASI "UNGGUL" LAM-PTKes SK No. 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022
Jln. Kampus Muhammadiyah No. 93, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh, 23245
Telp/Fax: 0651-31054/0651-31053
Website: <http://fkm.unmuha.ac.id> – Email: fkm@unmuha.ac.id

No : 521/UM.FKM.M/VI/2024
Lamp : 1 (satu) eks
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Banda Aceh, 12 Juni 2024

Kepada Yth.
Direktur/Pimpinan PT. PERTAMINA Provinsi Aceh
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Teiring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta karyawan selalu berada dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. Sehubungan adanya dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh akan mengadakan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah kota Banda Aceh, maka kami memohon izin kepada Bapak/Ibu Direktur/Pimpinan PT.PERTAMINA Provinsi Aceh untuk dapat memfasilitasi pengambilan data penelitian di SPBU wilayah setempat (daftar terlampir), dengan topik "**Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) Di Kota Banda Aceh Tahun 2024**";
3. Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dr. Basri Aramico. Ib, SKM., MPH
NIK. 19811029 200603 1001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
TERAKREDITASI "UNGGUL" LAM-PTKes SK No. 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022
Jln. Kampus Muhammadiyah No. 93, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh, 23245
Telp/Fax: 0651-31054/0651-31053
Website: <http://fkm.unmuha.ac.id> – Email: fkm@unmuha.ac.id

Lampiran:

A. Nama Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	NIDN/NPM
1	Putri Arisca Sari, SKM, M.KKK	Dosen	1307039301
2	Wardiati, SKM, M.Kes	Dosen	1319028801
3	Naimah, SKM, MKM	Dosen	1313039002
4	Putra Rizki Aulia	Mahasiswa	207110010
5	Muhammad Dea Al-Fattah	Mahasiswa	207110017
6	Rahmat Ariya	Mahasiswa	207110065

B. Nama SPBU sebagai lokasi penelitian

NO	SPBU	Alamat
1.	SPBU PERTAMINA LAMNYONG	Jl. Teuku Nyak Arief, Lamnyong, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23112, Indonesia
2.	SPBU BATOH	Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23122, Indonesia
3.	SPBU PERTAMINA 14.239.411	Jl. Cut Nyak Dien, Lamtemen Bar., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
4.	SPBU SIMPANG JAM	Jl. Teuku Umar No.6, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116, Indonesia
5.	SPBU PERTAMINA LINGKE 14.239.405	Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114, Indonesia
6.	SPBU PERTAMINA 14.231.482	Jl. Dharma, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia
7.	SPBU PERTAMINA LAMBHUK	Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia
8.	SPBU PERTAMINA 14.232.448	Jl. Medan B. Aceh, Gampong Pie, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
9.	SPBU LUENG BATA 14.232.404	Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia
10.	SPBU LAMPASEH 13.231.408	Jl. Rama Setia, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia
11.	SPBU COCO 11.231.401 RUDIN ACEH	Jl. Jenderal Sudirman No.96, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23233, Indonesia
12.	SPBU PERTAMINA PASTI PAS (SPBU 14.2354.65)	Jl. Teuku Nyak Arief, Sabang, Banda Aceh, Lamgugob, Syiah Kuala, Banda Aceh City, Aceh 24415, Indonesia
13.	SPBU KAMPUNG MULIA (PT. TRINANDA JAYA SINERGI)	Jl. Syiah Kuala Dsn Tgk Dibrang, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123, Indonesia
14.	SPBP POLDA ACEH	Lamtemen Bar., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23232, Indonesia
15.	SPBU NELAYAN 18.231.001	Jl. Indra Budiman, Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia



Dr. Basri Aramico, Ib, SKM., MPH
NIK. 19811029 200603 1001

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
Penerapan <i>Emergency Response Plan</i>	<i>Manajemen Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1 dan SPBU 4, implementasi Emergency Response Plan (ERP) dinilai masih kurang optimal meskipun sudah tersedia fasilitas dasar seperti alat pemadam api ringan (APAR). Kendala dalam pemahaman dan penerapan prosedur darurat oleh staf menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmaksimalan tersebut. Sebaliknya, SPBU 2 dan SPBU 3 melaporkan bahwa sistem ERP di tempat mereka sudah berjalan dengan baik, mencakup keterlibatan seluruh staf dalam pelatihan dan simulasi tanggap darurat
	<i>SOP Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1 dan SPBU 2, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) masih belum optimal karena mereka belum memiliki SOP yang jelas dan tertulis. Salah satu kekurangan yang menonjol adalah belum ditentukannya titik kumpul evakuasi secara spesifik. Sebaliknya, SPBU 3 dan SPBU 4 melaporkan bahwa mereka sudah memiliki SOP yang terstruktur dengan baik, termasuk pembentukan struktur organisasi yang jelas untuk penanganan

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
		situasi darurat. Setiap anggota staf telah diberikan tugas spesifik dalam menghadapi kondisi darurat, yang memperkuat koordinasi dan respons saat terjadi insiden.
	Pelaksanaan <i>Emergency Response Plan</i>	Dalam pelaksanaan Emergency Response Plan (ERP), seluruh SPBU siap menghadapi situasi darurat. Para petugas wajib memiliki kesiapan dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran, terutama ketika terjadi kebakaran, untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam mengendalikan situasi.
Organisasi <i>Emergency Response Plan</i>	Unit/Organisasi Khusus <i>Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1 dan SPBU 2, unit organisasi khusus untuk Emergency Response Plan (ERP) belum terbentuk secara formal. Meskipun demikian, dalam situasi darurat seperti kebakaran, SOP yang ada mengatur agar penanganan dilakukan secara langsung oleh staf yang ada. Sebaliknya, SPBU 3 dan SPBU 4 telah membentuk organisasi khusus yang melibatkan semua pekerja dalam struktur terkait keselamatan dan kesehatan kerja (HSSE), yang memberikan tanggung jawab

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
		terstruktur dalam menghadapi situasi darurat.
	Yang Termasuk Dalam Organisasi Khusus <i>Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1 2 dan 4, tidak ada unit organisasi khusus yang dibentuk untuk Emergency Response Plan (ERP), sehingga penanganan darurat tidak memiliki struktur organisasi yang formal. Sebaliknya, pada SPBU 4, seluruh karyawan terlibat dalam unit organisasi khusus yang dibentuk untuk menangani ERP. Keterlibatan semua karyawan dalam struktur ini memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam situasi darurat.
	Kinerja Tim Organisasi Khusus <i>Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1, SPBU 2, SPBU 3, dan SPBU 4, penilaian kinerja tim organisasi Emergency Response Plan (ERP) dalam menghadapi kebakaran belum dapat dilakukan, karena hingga saat ini belum pernah terjadi insiden kebakaran di lokasi mereka. Meskipun demikian, semua SPBU merasa yakin bahwa para pekerja telah dilatih dengan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat, walaupun belum ada pengalaman langsung

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
		dalam menghadapi kebakaran.
Penanggulangan Tanggap Darurat <i>Emergency Response Plan</i>	Penanggung Jawab Pembuatan Dokumentasi <i>Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1, SPBU 2, dan SPBU 4, penanggung jawab untuk pembuatan dokumentasi Emergency Response Plan (ERP) dipegang oleh pihak manajemen atau pengawas. Sementara itu, di SPBU 3, pembuatan dokumentasi ERP dilakukan oleh regu penunjang. Perbedaan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini mencerminkan variasi dalam pendekatan terhadap penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi tanggap darurat.
	Perencanaan Prosedur <i>Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1, belum ada perencanaan prosedur Emergency Response Plan (ERP) yang disusun karena dianggap tidak terdapat bahaya yang signifikan. Sebaliknya, pada SPBU 2, SPBU 3, dan SPBU 4, perencanaan prosedur ERP disusun secara sistematis oleh tim HSSE dari kantor pusat. Perbedaan dalam pendekatan ini menunjukkan variasi dalam tingkat kesiapan dan strategi perencanaan tanggap darurat antara berbagai SPBU.
	Perencanaan Pengendalian Risiko	Pada SPBU 3, struktur organisasi darurat telah terbentuk dengan adanya

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
	<i>Emergency Response Plan</i>	posisi manajer yang jelas, menunjukkan adanya perencanaan pengendalian risiko yang terstruktur. Sebaliknya, SPBU 1 dan SPBU 2 mengungkapkan bahwa mereka belum memiliki rencana pengendalian risiko yang formal. Di SPBU 3, implementasi Emergency Response Plan (ERP) sering memerlukan penyesuaian yang tidak sepenuhnya tercantum dalam pedoman buku, mencerminkan adanya kebutuhan untuk fleksibilitas dan adaptasi dalam penanganan situasi darurat.
Pelatihan Tanggap Darurat <i>Emergency Response Plan</i>	<i>Program Pelatihan Emergency Response Plan</i>	Keempat SPBU menerapkan program pelatihan Emergency Response Plan (ERP), termasuk pelatihan Operasional Kesehatan dan Keselamatan (OKD). Meskipun semua SPBU menyediakan pelatihan, terdapat variasi dalam metode, frekuensi, dan cakupan materi yang diajarkan.
	<i>Kepada Siapa Program Pelatihan Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1, SPBU 2, dan SPBU 4, program pelatihan Emergency Response Plan (ERP) difokuskan hanya pada operator, sementara di SPBU 3, pelatihan diberikan kepada seluruh pekerja, dengan semua staf terlibat aktif dalam

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
		proses pelatihan. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam strategi pelatihan dan keterlibatan karyawan di berbagai SPBU.
	<i>Drilling Emergency Response Plan</i>	Pada SPBU 1 dan SPBU 4, pelaksanaan drill Emergency Response Plan (ERP) dilakukan oleh pihak Pertamina, sedangkan SPBU 2 dan SPBU 3 melibatkan pihak pemadam kebakaran (damkar) dalam proses drill tersebut. Di SPBU 4, drill juga dilakukan secara mandiri oleh pihak SPBU dengan menggunakan tong berisi bahan bakar dan ban mobil bekas serta alat pemadam api ringan (APAR) untuk simulasi.
Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran	Proses Pelaporan Keadaan Darurat Saat Terjadi Kebakaran	Dalam proses pelaporan keadaan darurat saat terjadi kebakaran, SPBU 1 melaporkan insiden tersebut langsung kepada pemiliknya. Sebaliknya, SPBU 2, SPBU 3, dan SPBU 4 tidak mengikuti prosedur pelaporan yang baku mereka segera melaporkan kebakaran ke nomor khusus yang telah ditentukan, seperti menghubungi pemadam kebakaran dan melaporkan keadaan darurat kepada pihak Pertamina.

Variabel Penelitian	Subtema	Tema
	Siapa Yang Dihubungi Pertama Saat Terjadi Kebakaran	Dalam situasi darurat kebakaran, SPBU 1, SPBU 2, dan SPBU 4 segera menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk menangani insiden tersebut. Sebaliknya, di SPBU 3, regu pemadam internal bertanggung jawab untuk mengambil tindakan awal sebelum pihak pemadam kebakaran tiba, memastikan bahwa langkah-langkah pertama dalam penanggulangan kebakaran dilakukan secara cepat dan efektif.
	Seberapa Cepat Respon Pihak Yang Dihubungi Saat Kebakaran	SPBU 1 dan SPBU 4 melaporkan bahwa respons dari pihak pemadam kebakaran sangat cepat karena jarak yang dekat, sehingga akses menuju lokasi insiden lebih mudah dan cepat. Sebaliknya, SPBU 2 dan SPBU 3 mengungkapkan bahwa mereka belum dapat menilai kecepatan respons pihak pemadam, karena mereka belum pernah berhubungan langsung dengan pemadam kebakaran dalam situasi darurat dan belum mengetahui seberapa cepat respons yang dapat diberikan.

Lampiran VII

DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA

1. SPBU PT. Sinar Pusaka 14.239.411



Melakukan pengecekan
APAR 9 kg



Melakukan pengecekan
APAB 80 kg



Menanyakan nomor
keadaan darurat



Menanyakan terkait sarana dan
prasarana yang ada di SPBU

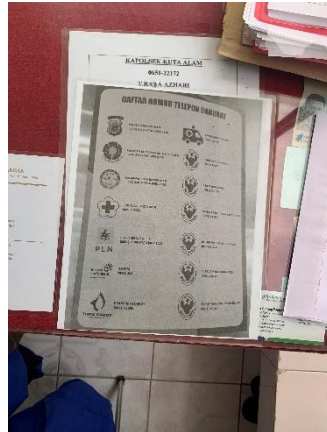


Melihat Kualitas dan Kuantitas APAR

2. SPBU PT Ansy Syaufi Petroleum 14.239.412



Pengecekan Kualitas dan Kuantitas APAR



Dokumentasi Nomer penting saat terjadi keadaan darurat



Melakukan Kualitas dan Kuantitas APAB tersebut

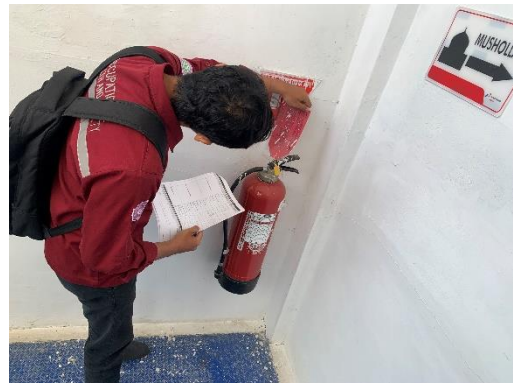


Melakukan pengecekan APAB

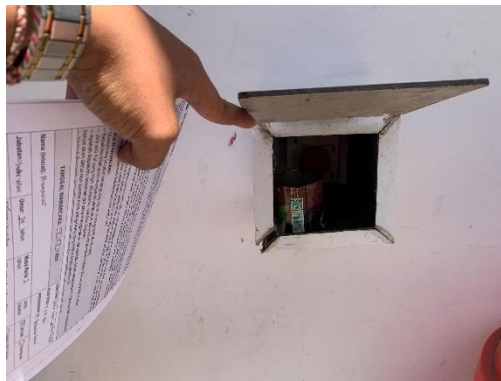
3. SPBU PT Coco Sudirman 11.231.401



Pengecekan nomor penting saat terjadi keadaan darurat



Pengecekan APAR beserta Kualitas dan Kuantitas



Pengecekan tombol instalasi otomatis



Pengecekan Kualitas dan Kuantitas APAR



Pengecekan rambu rambu yang ada pada dispenser



Pengecekan titik kumpul saat terjadi keadaan darurat



Pengecekan arah jalur evakuasi saat terjadi keadaan darurat



Pengecekan nomor penting saat terjadi keadaan darurat

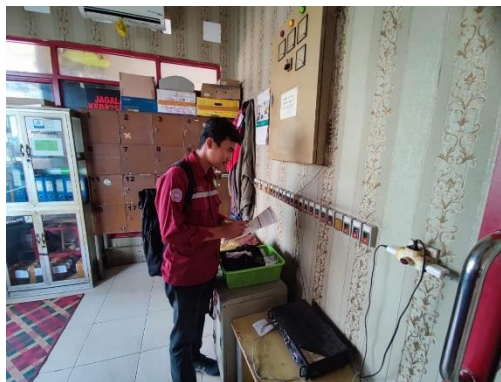
4. SPBU PT Lampaseh Jaya Montes 14.231.482



Pengecekan nomor penting saat terjadi keadaan darurat



Tombol instalasi otomatis yang ada di dalam kantor



Pengecekan instalasi otomatis pompa dan dispenser yang ada pada kantor



Pengecekan rambu rambu yang ada pada dispenser



Tombol instalasi otomatis yang ada pada dispenser pengisian bahan bakar

Lampiran VIII

DOKUMENTASI PENELITIAN

